

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI
MEDAN**

SKRIPSI

**ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KOTA MEDAN
(STUDI KASUS PADA DINAS TATA KOTA TATA BANGUNAN)**

OLEH :

**NAMA : ENDAH NOVIANA
NIM : 040503113
DEPARTEMEN : AKUNTANSI**



**Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
2009**

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

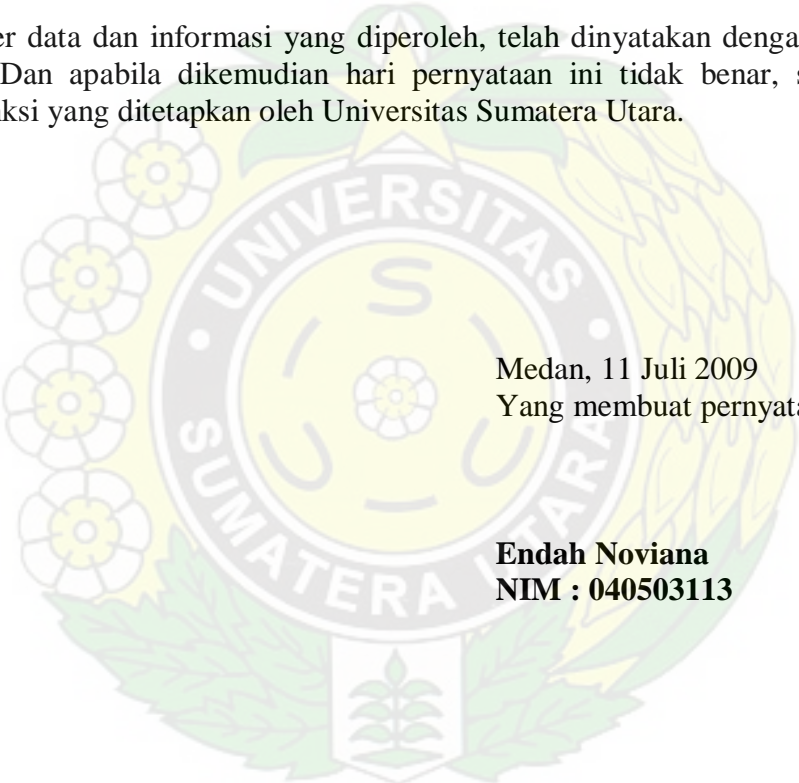
PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan)

adalah benar hasil karya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan, atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi level program S-1 Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Semua sumber data dan informasi yang diperoleh, telah dinyatakan dengan jelas, benar apa adanya. Dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh Universitas Sumatera Utara.



Medan, 11 Juli 2009
Yang membuat pernyataan,

Endah Noviana
NIM : 040503113

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Sumatera Utara. Meskipun telah banyak penelitian tentang akuntansi pemerintahan, penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Penelitian ini dikhususkan kepada Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada para pembaca sekaligus memberikan motivasi untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih baik.

Penyelesaian skripsi ini dapat terwujud berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Drs. Arifin Akhmad,MSi, Ak selaku Ketua Departemen dan Bapak Fahmi Natigor Nst, SE, M.Acc, Ak selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Drs.Idhar Yahya, MBA, Ak selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis, serta Bapak Drs. Syamsul Bahri Trb, MM, Ak selaku dosen Pembimbing dan Penguji-I dan Bapak Sambas

- Ade Kesuma SE, MSi, Ak selaku dosen pembeding dan penguji-II penulis yang telah memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sucipto MM, Ak selaku dosen wali selama penulis menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan.
 5. Kedua orang tuaku yang telah memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan setiap saat.
 6. Ir.Rasun dan Ir.Lisnidar sekeluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
 7. Semua kakak dan abang serta keponakan yang telah memberikan do'a dan dukungannya.
 8. Rahmad Setiawan ST yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penulis.
 9. Sahabat dan teman-teman akuntansi-S1 angkatan 2004.

Penulis sadar skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Medan, 11 Juli 2009

Penulis

ENDAH NOVIANA

NIM: 040503113

ABSTRAK

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkan laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD di Kota Medan khususnya Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus. Penulis menggunakan teknik wawancara dan teknik studi dokumentasi untuk pengumpulan data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan telah melakukan proses pencatatan akuntansinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005, sedangkan untuk Penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, namun Laporan Keuangan telah disajikan tepat waktu sehingga bisa dipergunakan bagi kelompok pengguna Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan.

ABSTRACT

Each Unit of Work Tool Area (SKPD) perform the accounting of economic transactions that occurred in part, to produce financial reports. The objective of this research is analyzing the suitability of the recording and reporting on financial SKPD especially in Dinas Tata kota dan Tata Bangunan with the Minister of Home Affairs Regulation No. 13 Year 2006 (Permendagri) Number 13 Year 2006 and Government Regulation No.24 Year 2005.

This research uses descriptive research design in the form of case studies. The author uses interview techniques and techniques to study the documentation of data collection is needed.

Results of research indicate that Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan has been recording that accounting in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 13 Year 2006 and Government Regulation No.24 Year 2005, while for the Financial Reports is not fully in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation No. 13 In 2006, the Financial Report was presented on time so that it can be used for user groups to Financial decision-making.

Keywords: Recording process and Financial Reporting, The Unit of Work Area (SKPD), Dinas Tata kota dan Tata Bangunan Kota Medan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teoritis	
1. Pengelolaan Keuangan Daerah	7
2. Akuntansi Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	9
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Konseptual	46

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	48
	B. Jenis Data	48
	C. Teknik Pengumpulan Data	49
	D. Metode Analisis Data	49
	E. Jadwal Dan Lokasi Penelitian	50
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN	
	A. Data Penelitian	
	1. Sejarah Singkat Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan	51
	2. Tugas Pokok Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan	52
	3. Struktur Organisasi Dinas Tata kota dan Tata Bangunan	55
	4. Sistem Akuntansi pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan	63
	B. Analisis Hasil Penelitian	
	1. Analisis Pencatatan	82
	2. Anilisis Pelaporan Keuangan	83
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	85
	B. Saran.....	86

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Judul</u>	<u>Hal</u>
Tabel 2.1	Saldo Normal Perkiraan	10
Tabel 2.2	Tinjauan Penelitian Terdahulu	41



DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>	<u>Judul</u>	<u>Hal</u>
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual Penelitian	42
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan	58



DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Judul</u>
1	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Tahun Anggaran 2007
2	Laporan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Tahun Anggaran 2008
3	Neraca Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Tahun Anggaran 2007 & 2008.
4	Laporan Arus Kas Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Tahun Anggaran 2007.
5	Laporan Arus Kas Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Tahun Anggaran 2008.
6	Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Tahun Anggaran 2007 & 2008.
7	Surat Keterangan/Izin Penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Dalam upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan

melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan terdapat didalam ruang entitas pemerintahan tersebut. Laporan tahunan (Laporan Keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas (Steccolini, 2002).

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 5 April 2007 lalu, pemerintah telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang “Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” untuk memperinci Permendagri 13. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut,

SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan

Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kertas kerja/ Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dinas Tata Kota Tata Bangunan (TKTB) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah pemerintah kota Medan sekaligus sebagai penguas anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan telah melakukan pencatatan akuntansi dengan baik (dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan)?
2. Apakah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan telah menyusun Laporan Keuangan dengan baik (dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan)?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini tujuannya adalah untuk membatasi cakupan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan untuk Tahun Anggaran 2007 & 2008.

D. Tujuan Penelitian

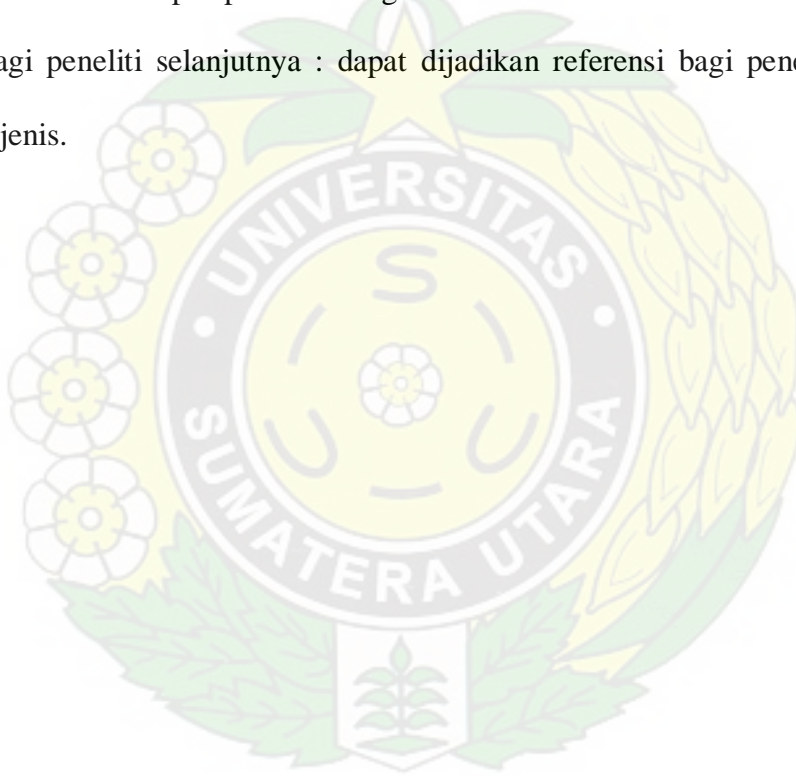
Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan telah melakukan pencatatan akuntansi dengan baik (dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan).
2. Untuk mengetahui apakah Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan telah menyusun Laporan Keuangan dengan baik (dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis : untuk menambah pengetahuan khususnya tentang pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Bagi Dinas Tata Kota Tata Bangunan : sebagai bahan pertimbangan dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya : dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri.

Menurut PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Masih menurut PP No.58 tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisien, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota saja. Tapi, dalam Permendagri itupun disebutkan, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan.

2. Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu :

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Selanjutnya dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah tentang akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264) mengatur tentang prosedur akuntansi SKPD yaitu meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264) juga mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas.

Kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan Bendahara di SKPD.

PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut :

- Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait.
- Memposting jurnal-jurnal pendapatan, belanja, asset dan selain kas ke dalam buku besarnya masing-masing.
- Membuat Laporan Keuangan, yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bendahara di SKPD memiliki tugas:

- Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi SKPD.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus Akuntansi adalah tahap-tahap yang dalam sistem akuntansi. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1). Analisis Transaksi

Langkah awal dalam melakukan akuntansi untuk perkiraan-perkiraan yang ada dalam laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (terutama penjurnalan) adalah melakukan analisis transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi tersebut, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan mana yang didebet dan mana yang dikredit. Masing-masing elemen dari Laporan Keuangan dapat bertambah maupun berkurang.

Mendebet suatu perkiraan bukan berarti penambahan atau pengurangan, tergantung pada jenis perkiraannya. Demikian juga halnya dengan mengkredit

suatu perkiraan. Untuk lebih memahami bertambah dan berkurangnya suatu perkiraan, maka perlu diketahui tentang saldo normal dari masing-masing perkiraan. Berikut ini table saldo normal suatu perkiraan.

Tabel 2.1
Saldo Normal Perkiraan

PERKIRAAN	DEBET	KREDIT	SALDO NORMAL
ASET	(+)	(-)	DEBET
KEWAJIBAN	(-)	(+)	KREDIT
EKUITAS DANA	(-)	(+)	KREDIT
PENDAPATAN (Penerimaan-Pembiayaan)	(-)	(+)	KREDIT
BELANJA (Pengeluaran-Pembiayaan)	(+)	(-)	DEBET

Sumber : Paparan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, 2006.

2). Jurnal

Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dan transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Jurnal merupakan sumber utama pencatatan ke perkiraan. Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peran perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat ke buku besar suatu perkiraan.

Dengan bantuan jurnal, pencatatan ke masing-masing perkiraan akan menjadi lebih mudah, sebab jurnal sudah memisahkan suatu perkiraan dalam

debit dan kredit. Penjurnalan dapat dilakukan secara harian dan bulanan. Jurnal dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi.

Berikut ini contoh formulir jurnal umum :

Jurnal Umum

Tanggal	Kode Perkiraan	Nama Perkiraan	Ref	Debet	Kredit

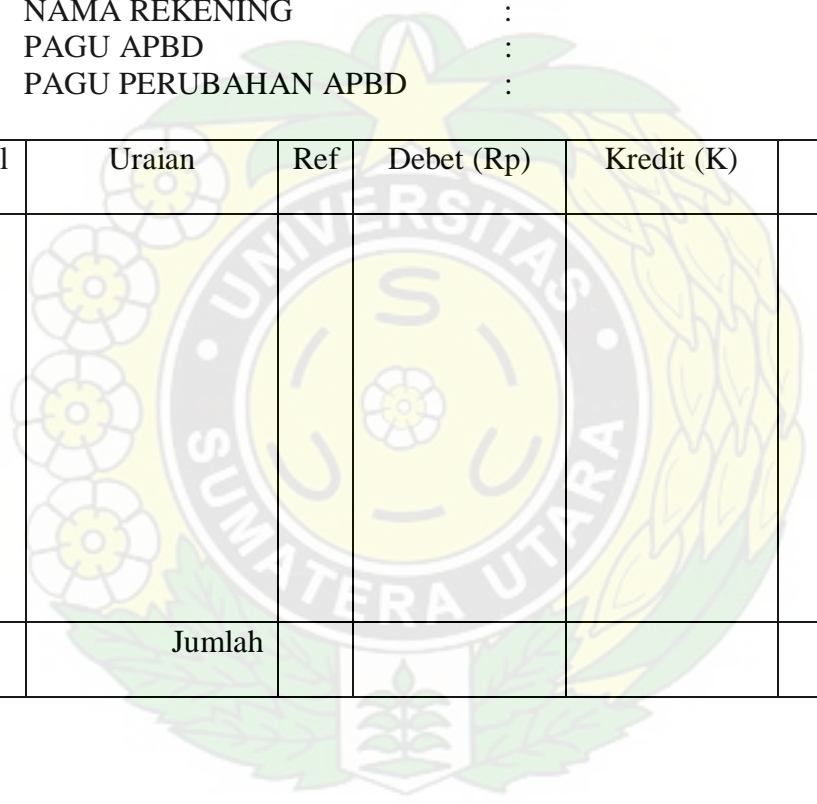
3). Posting ke Buku Besar

Langkah selanjutnya setelah melakukan jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Posting merupakan proses memindahkan jumlah yang terdapat pada sisi debit dan sisi kredit ke perkiraan buku besar yang bersangkutan. Posting ke buku besar dapat dilakukan secara harian maupun bulanan.

Buku besar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir. Berikut ini adalah bentuk buku besar suatu perkiraan.

PEMERINTAH KOTA MEDAN
 BUKU BESAR

SKPD :
 KODE REKENING :
 NAMA REKENING :
 PAGU APBD :
 PAGU PERUBAHAN APBD :



Tgl	Uraian	Ref	Debet (Rp)	Kredit (K)	Saldo
	Jumlah				

4). Neraca Saldo

Pada akhir periode akuntansi disusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/ perkiraan Buku Besar. Neraca Saldo biasanya disiapkan pada akhir periode atau juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa Buku Besar secara sistematis adalah akurat dengan pengertian bahwa

jumlah saldo-saldo debet selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan-catatan akuntansi benar-benar akurat.

Untuk menyiapkan neraca saldo, saldo tiap perkiraan harus ditentukan terlebih dahulu. Bentuk neraca saldo adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA SALDO PER TANGGAL.....**

SKPD :..... Halaman :...

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		Debet	Kredit
	Total		

5). Jurnal Penyesuaian

Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi, atau untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode lain.

Akuntansi pemerintahan menganut basis kas untuk penyusunan laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk menyusun neraca, sehingga perlu

melakukan penyesuaian untuk perkiraan-perkiraan tertentu. Perkiraan-perkiraan yang perlu disesuaikan pada akhir tahun adalah sebagai berikut :

- Pendapatan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan belum diterima. Jurnal yang diperlukan untuk kejadian ini adalah :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
31/12/2008	Piutang pajak		xxx	-
	Cadangan Piutang		-	Xxx

- Pada akhir tahun perlu dilakukan inventarisasi fisik untuk menentukan saldo perkiraan persediaan barang per 31 Desember yang belum terpakai seperti alat tulis kantor, bahan bangunan, dan sebagainya. Sehingga akhir tahun jumlah persediaan yang belum terpakai ini harus disajikan dalam laporan keuangan yaitu dalam neraca sebagai asset lancar. Jurnal yang diperlukan untuk kejadian ini adalah :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
31/12/2008	Persediaan		xxx	-
	Cadangan Persediaan		-	Xxx

- Penyusutan asset tetap. Pada akhir tahun perlu dilakukan jurnal penyesuaian untuk asset tetap untuk menyesuaikan penurunan nilai dari asset tersebut. Jurnal yang diperlukan untuk keadaan ini adalah sebagai berikut :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
31/12/2008	Diinvestasikan pada aset tetap		xxx	-
	Akumulasi penyusutan.....		-	Xxx

- Dan sebagainya.

6). Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat langkah berikutnya adalah mempostingnya ke dalam perkiraan buku besar yang berhubungan. Setelah melakukan posting maka prosedur berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru itu akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

7). Laporan Keuangan

Setelah Neraca Saldo setelah Penyesuaian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD bias menggunakan bantuan kertas kerja (*wopk sheet*). Dari kertas kerja yang sudah diisi, PPK-SKPD dapat menyusun Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No.24 tahun 2005. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Peranan laporan keuangan pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah meliputi :

- a) Akuntabilitas : Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b) Manajemen : Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c) Transparansi : Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*) : Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan Keuangan yang harus dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 pasal 232 adalah sebagai berikut :

1.Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran SKPD, yang terdiri dari pendapatan dan belanja, dan realisasi atas anggaran tersebut. Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat (a) selisih antara anggaran dan realisasinya; (b) rasio-rasio antar-rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap PAD, dsb.

Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA MEDAN
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...

(dalam rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
	Jumlah			
2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Barang			
2.2	BELANJA MODAL			
2.2.1	Belanja Tanah			
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan			
2.2.4	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan			
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			

2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
2.3.1	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah			
	Surplus/(Defisit)			

Sumber: Peraturan menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset secara umum diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Secara rinci aset di Pemerintah daerah dibedakan atas :

- Aset lancar; aset lancar meliputi kas, setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- Aset Tetap; aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Aset Lainnya; Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas dana dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Format Neraca SKPD adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH KOTA MEDAN
NERACA
SKPD.....
Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET ASET LANCAR Kas Investasi Jangka pendek Piutang Persediaan				
Jumlah				
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Peralatan Kantor				
Jumlah				
ASET LAINYA Tagihan penjualan angsuran Aset tak berwujud Aset lain-lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang perhitungan pihak ketiga Utang muka dari kas daerah Utang jangka pendek lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan				
Jumlah				
EKITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap				

Diinvestasikan dalam aset lainnya				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak “terbaca” dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Berbeda dengan fungsi buku besar pembantu, Catatan Atas Laporan Keuangan tidak hanya merinci lebih jauh rekening-rekening dalam laporan keuangan tersebut, tetapi juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode, dan dasar penentuan dan penyajian angka-angka Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selain itu, di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

- Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.
- Mengungkapkan informasi yang untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, dan,
- Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

Format Catatan atas Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut :

	PEMERINTAH KOTA MEDAN SKPD
Pendahuluan	
Bab I	Pendahuluan
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
	2.1. Ekonomi makro
	2.2. Kebijakan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
	3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Keuangan Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	4.3. Basis Pengukuran Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD
Bab V	Pos-pos Laporan Keuangan SKPD
	5.1. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan SKPD
	5.1.1. Pendapatan
	5.1.2. Belanja
	5.1.3. Pembiayaan (Khusus SKPKD)
	5.1.4. Aset
	5.1.5. Kewajiban
	5.1.6. Ekuitas Dana
	5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang Timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan belanja dan

rekonsiliasinya dengan Penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi /entitas
Pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan SKPD
Bab VII Penutup

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006

8). Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal (*temporary*) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan dan Belanja. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan yang bersifat nominal tidak ikut atau tidak terbawa pada periode berikutnya, sehingga saldo perkiraan tersebut perlu dinihilkan. Pada dasarnya, jurnal penutup adalah mendebetkan perkiraan yang bersaldo kredit dan mengkreditkan perkiraan yang bersaldo debet dan selisihnya merupakan surplus atau defisit. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar.

Contoh jurnal penutup :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		D	K
4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi	xxx	-
3.1.1.01.01	SILPA	-	xxx
3.1.1.01.01	SILPA	xxx	-
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok	-	xxx
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	-	xxx
5.2.2.01.01	Belanja ATK	-	xxx
5.2.2.03.03	Belanja Air, Listrik dan Telepon	-	xxx

Secara umum Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

- **Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari satu kesatuan tersebut.

Menurut PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/ daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.

Proses pencatatan transaksi pendapatan dilakukan saat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) adalah sebagai berikut :

1. Setelah menerima Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penerimaan dan lampirannya dari bendahara penerimaan, PPK-SKPD mencatat transaksi dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx	-
	Pendapatan.....		-	Xxx

2. Pendapatan yang diterima kemudian disetor kepada Kas Daerah (Bendahara Penerimaan diwajibkan menyetorkan hasil pendapatan daerah tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah uang diterima, kecuali dalam keadaan tertentu). PPK-SKPD kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Rek.Kas Daerah (PPKD)		xxx	-
	Kas di Bendahara Penerimaan		-	Xxx

3. Setiap periode, jurnal-jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan. Diakhir periode tertentu, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

- **Akuntansi Belanja**

Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada dibank. Belanja barang dan jasa adalah semua pembayaran pemerintah dalam pertukaran barang dan jasa, baik dalam bentuk upah dan gaji untuk pegawai, atau pembelian lain atas barang

dan jasa. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.

Menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Belanja pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan)/GU (Ganti Uang)/TU (Tambah Uang) dan akuntansi belanja LS (Langsung).

- Akuntansi Belanja UP/GU/TU

Langkah-langkah dalam akuntansi belanja UP/GU/TU adalah sebagai berikut :

1. PPK-SKPD menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) melalui Pengguna Anggaran. Berdasarkan SP2D, PPK-SKPD mencatat transaksi penerimaan uang persediaan (UP) tersebut dengan menjurnal :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx	-
	Rek.Kas Daerah (PPKD)		-	Xxx

2. Secara berkala, PPK-SKPD menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi. Berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat transaksi-transaksi belanja periode sebelumnya dengan menjurnal :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Belanja ATK		xxx	-
	Kas di bendahara Pengeluaran		-	Xxx
Tgl	Belanja Materai		xxx	-
	Kas di bendahara Pengeluaran		-	Xxx

3. Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja.
4. Diakhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke neraca saldo.

- Akuntansi Belanja LS (Langsung)

Belanja LS (Langsung) yang dimaksud adalah belanja LS Gaji dan Tunjangan dan belanja LS barang dan jasa. Dalam konteks belanja LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Berbeda dengan belanja UP/GU/TU, pada belanja LS, saat SP2D telah diterbitkan, maka PPK-SKPD sudah dapat mencatat

belanja. Dengan kata lain, belanja sudah dapat diakui saat SP2D diterbitkan,. Sedangkan pada belanja UP/GU/TU , pengakuan belanja dilakukan saat sudah di SPJ-kan.

1. Pencatatan Akuntansi Belanja Langsung adalah sebagai berikut :
PPK-SKPD menerima SP2D dari kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran, jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Belanja.....		xxx	-
	Rek.Kas Daerah (PPKD)		-	Xxx

2. Dalam kasus belanja LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD.
3. Dalam kasus belanja LS Barang dan jasa, seringkali terdapat potongan pajak sehingga yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal umum, jika pemotongan dan pembayaran pajak dilakukan oleh BUD.

4. Khusus untuk transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, PPK-SKPD disamping mencatat mencatat belanja modal untuk aset tetap tersebut, juga mencatat penambahan aset. Jurnal kedua ini disebut jurnal korolari Jurnal yang harus dibuat PPK-SKPD jika ada belanja modal adalah sebagai berikut :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Belanja Modal-Komputer		xxx	-
	Rek. Kas Daerah (PPKD)*		-	Xxx
Tgl	Aset-tetap komputer		xxx	-
	Ekuitas Dana Investasi		-	Xxx

Catatan :

- * Rek. Kas Daerah (PPKD)dikredit dengan asumsi pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan oleh BUD.
- Jurnal korolari boleh dilakukan pada akhir periode.
- Karena transaksi ini akan dipakai terus, maka dibuat jurnal khusus belanja UP/GU/TU.

5. Setiap periode, jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja. Diakhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

- **Akuntansi Aset**

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai / digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam 2 kelompok besar transaksi, yaitu : Penambahan nilai aset dan Pengurangan nilai aset.

- 1). Pencatatan aset dimulai dengan adanya bukti transaksi yang berupa :
 - a. Berita acara penerimaan barang, dan atau,
 - b. Berita acara serah terima barang, dan atau,
 - c. Berita acara penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut dapat dikembangkan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- 1). Jenis/ nama aset tetap
- 2). Kode rekening terkait

3). Klasifikasi aset tetap

4). Nilai aset tetap

5). Tanggal transaksi

- 2). Khusus untuk belanja modal, selain mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran juga akan mempengaruhi Neraca. Untuk itu perlu dilakukan pencatatan penambahan nilai aset. Berdasarkan bukti memorial tersebut, PPK-SKPD mengakui penambahan nilai aset dengan melakukan jurnal korolari sebagai berikut :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Komputer		xxx	-
	Ekuitas Dana Investasi		-	Xxx

- 3). Dalam kasus pengurangan aset, berdasarkan bukti memorial, PPK-SKPD mengakui pengurangan aset dengan menjurnal :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Ekuitas Dana Investasi		xxx	-
	Komputer		-	Xxx

- 4). Secara periodik, buku jurnal atas transaksi aset tetap tersebut diposting kedalam buku besar rekening berkenaan.

5). Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Pencatatan aset tetap dalam buku jurnal merupakan proses lanjutan dari proses lanjutan dari belanja daerah yang menghasilkan aset tetap. Oleh karena itu, jurnal untuk mencatat saat perolehan aset tetap sering disebut sebagai jurnal *Collolary*. Beberapa contoh jurnal terkait dengan aset tetap adalah sebagai berikut:

- Perolehan aset tetap (melalui pembelian)

Harga perolehan aset tetap termasuk didalamnya adalah biaya- biaya yang diperlukan sampai aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain biaya pengangkutan, biaya instalasi.

Jurnal perolehan aset tetap melalui pembelian adalah aset tetap :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Belanja Modal-Papan tulis elektronik		xxx	-
	Kas di bendahara pengeluaran		-	xxx
Tgl	Papan tulis elektronik		xxx	-
	Ekuitas Dana Investasi		-	xxx

- Penyusutan

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh asset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut. Jurnal penyusutan ini dibuat diakhir tahun.

Jurnal penyusutan adalah sebagai berikut :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
Tgl	Ekuitas Dana Investasi		xxx	-
	Akm. Penyusutan papan tulis elektronik		-	Xxx

- Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah konstruksi/ bangunan yang belum selesai dikerjakan hingga periode akuntansi (misal periode 2007), maka pada tanggal 31 Desember 2007 PPK-SKPD akan mencatat biaya-biaya modal yang telah dikeluarkan selama pembangunan sampai 31 Desember 2007 (misal jumlah biaya yang dikeluarkan adalah Rp. 1000.000) dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
31/12/2007	Konstruksi dalam pengerjaan		Rp. 1000.000	-
	Ekuitas Dana Investasi		-	Rp. 1000.000

Misal pada tanggal 31 Mei 2008 bangunan tersebut telah selesai dibangun, total belanja modal untuk pembangunan tersebut sebesar Rp. 4.000.000, maka jurnalnya sebagai berikut :

Jurnal pembalik atas pencatatan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2007 :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
31/12/2007	Ekuitas Dana Investasi		Rp. 1000.000	-
	Konstruksi dalam pengerjaan		-	Rp. 1000.000

Jurnal korolari untuk mencatat penambahan asset tetap :

Tgl	Perkiraan	Ref	D	K
31/05/2008	Gedung		Rp. 4000.000	-
	Ekuitas Dana Investasi		-	Rp. 4000.000

• **Akuntansi selain kas**

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian keuangan selain kas yang dapat dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi.

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi setidaknya :

a. Koreksi kesalahan pencatatan

Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

b. Transaksi transfer uang antar SKPD

Merupakan transaksi transfer uang dari BUD ke SKPD dan sebaliknya juga transfer uang dari satu SKPD ke SKPD lainnya.

c. Pengakuan aset, hutang, dan ekuitas

Merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh SKPD. Pengakuan aset sangat terkait dengan belanja modal yang dilakukan oleh SKPD.

d. Jurnal depresiasi

Merupakan jurnal depresiasi terhadap aset yang dimiliki oleh SKPD.

e. Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*

Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun pengeluaran kas belum dilakukan (*accrual*) atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan datang (*prepayment*).

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

1). PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

2). PPK-SKPD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan.

3). Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya oleh Karunia Sari Nur Pangesti pada tahun 2008 dengan judul “Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: studi kasus penerapan permendagri nomor 13 tahun 2006 dipemerintah daerah kabupaten Batang”, dengan objek penelitian kesesuaian Buku Besar, Prosedur Akuntansi dan Jurnal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006, hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pokok dan pendukung dalam sistem akuntansi keuangan SKPD di Kabupaten Batang berada pada keadaan yang telah sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006, kesesuaian Buku Besar, Prosedur Akuntansi dan Jurnal berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 secara berurutan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan.

Riodinar Harianja (2008) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir” hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sudah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007.

Tabel 2.2

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
Karunia Sari Nur Pangesti, 2008	Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: studi kasus penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dipemerintah daerah kabupaten Batang.	Kesesuaian Buku Besar, Prosedur Akuntansi dan Jurnal berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.	<p>1. unsur-unsur pokok dan pendukung dalam sistem akuntansi keuangan SKPD di Kabupaten Batang berada pada posisi/keadaan yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006</p> <p>2. kesesuaian Buku Besar, Prosedur Akuntansi dan Jurnal berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 secara berurutan menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi sistem akuntansi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan.</p>
Riodinar Harianja, 2008	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	Kesesuaian penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006.	Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sudah menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Permendagri No.13 tahun 2006 yang dimulai untuk tahun anggaran 2007

C. Kerangka Konseptual

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

Kerangka konseptual penelitian merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antar variabel dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alur berikut yang disertai penjelasan kualitatif.



KESIMPULAN

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Keterangan Gambar:

Penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kota Medan khususnya di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)- Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan. Adapun data yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Jurnal Penutup dan Laporan Keuangan.

Penulis akan membandingkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Pemerintah Kota Medan khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)- Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah berupa studi deskriptif yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu obyek penelitian.

B. Jenis Data

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer: yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengupulkan keterangan untuk selanjutnya diolah sesuai kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Pejabat Penatausaha Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan.
- b. Data sekunder: yaitu data yang telah diolah sehingga menjadi lebih informatif dan langsung dapat dipergunakan. Data sekunder yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain :
 - Sejarah singkat Dinas Tata Kota Tata Bangunan
 - Struktur organisasi Dinas Tata Kota Tata Bangunan
 - Sistem Akuntansi Keuangan pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Teknik wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian yaitu PPK-SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
2. Studi dokumentasi, dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

D. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan ciri dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

E. Jadwal penelitian dan Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan kota Medan yang beralamat di Jalan Jendral A.H. Nasution No. 17 Medan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2008 sampai dengan selesai.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Data Penelitian

1. Sejarah singkat Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan

Bidang penataan kota dan bangunan pada awalnya merupakan bagian dari pekerjaan umum. Pengawasan bangunan dan planologi (perencanaan wilayah dan kota) sampai dengan tahun 1950 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Pada

tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum dipisah menjadi 2 (dua) dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengawasan Bangunan.

Pada tahun 1963, Dinas Pengawasan Bangunan dimekarkan menjadi 2 (dua) dinas, yaitu Dinas Pengawasan Bangun-Bangunan dan Dinas Planologi. Dalam hal ini, Dinas Planologi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan KDH Tingkat II Medan tanggal 22 Juni 1963 terhitung mulai 1 Juli 1963.

Pada tahun 1978 dibentuk Dinas Tata Kota Kotamadya Dati II Medan diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Medan No.10 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Dati II Medan. Penyempurnaan terhadap organisasi Dinas Tata Kota dilakukan pada tahun 1987 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Medan No.1 tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Dati II Medan. Adapun susunan organisasi dan tata kerja Dinas Bangun-bangunan Kotamadya Dati II Medan diatur dalam Perda No. 13 tahun 1987.

Pada tahun 2001, berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan; dibentuk Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan yang merupakan penggabungan kembali fungsi pengawasan bangun-bangunan dan penataan ruang kota dalam satu dinas; sebagaimana sebelum tahun 1963. Penggabungan Dinas Tata Kota dengan sebagian Dinas Bangun-bangunan

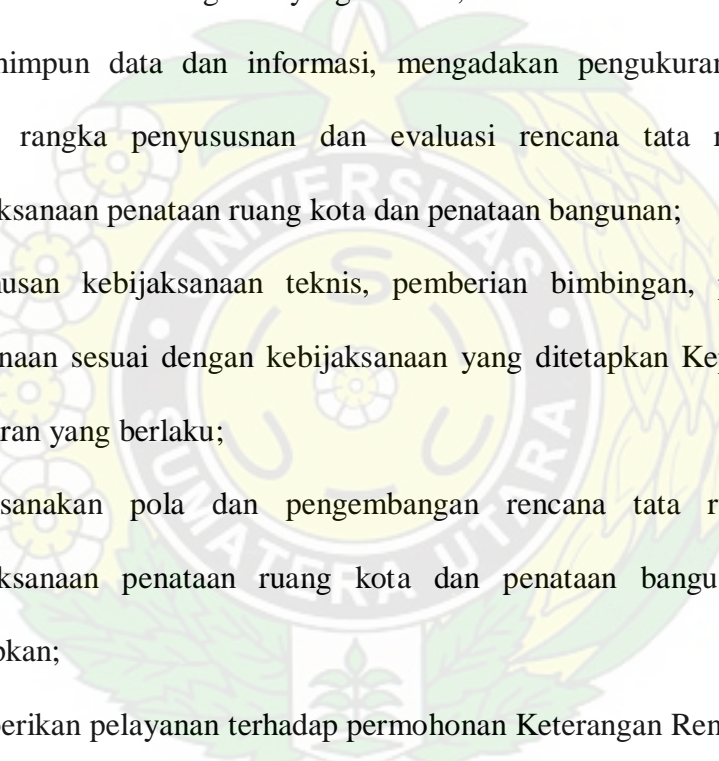
dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan perizinan dan penataan ruang serta penataan bangunan oleh Pemerintah Kota Medan.

2. Tugas Pokok Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan

Pembentukan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan yang merupakan penggabungan Dinas Tata Kota dan sebagian Dinas Bangun-bangunan (fungsi tata bangunan) disertai adanya pengembangan/perluasan tugas dan fungsi dalam rangka penataan kota. Pembentukan Dinas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan No.4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pada Bagian Kedua Belas pasal 48 dan 49 dari Perda tersebut menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan sebagai berikut : “ Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang tata kota dan tata bangunan, antara lain menyusun, mengembangkan dan mengendalikan rencana tata ruang kota, pengurusan perizinan dan pembinaan terhadap pembangunan fisik kota yang sehat dan terarah sesuai dengan rencana tata ruang kota dan pola kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang tata kota dan tata bangunan;

- 
- b. Mengadakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka perumusan, pengembangan, dan penetapan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan bangunan yang berlaku;
 - c. Mengevaluasi dan merevisi rencana tata runag kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan kota dan bangunan yang berlaku;
 - d. Menghimpun data dan informasi, mengadakan pengukuran dan pemetaan dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan;
 - e. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan, penyuluhan dan pembinaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah dan Peraturan yang berlaku;
 - f. Melaksanakan pola dan pengembangan rencana tata ruang kota dan kebijaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan;
 - g. Memberikan pelayanan terhadap permohonan Keterangan Rencana Peruntukan (KRP), Keterangan Situasi Bangunan (KSB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pelayanan serta memungut retribusi atas pemberian KRP, KSB, IMB dan pelayanan lain tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- h. Mengadakan pengawasan dan penindakan penertiban terhadap pelestarian penataan ruang kota dan penataan bangunan serta teknis konstruksi yang telah ditetapkan, bekerjasama dengan instansi terkait;
- i. Merumuskan kebijaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan konversi bangunan;
- j. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut akan lebih luas dibandingkan tugas pokok dan fungsi yang lama. Penambahan fungsi penindakan penertiban merupakan salah satu aspek yang membutuhkan perhatian karena hal tersebut harus dilaksanakan, walaupun saat ini belum didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia, peralatan dan peraturan pelaksanaan yang memadai.

Saat ini pelaksanaan tugas pelayanan Keterangan Situasi Bangunan telah tidak ada, karena telah merupakan salah satu kesatuan dalam pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

3. Struktur Organisasi Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan

Struktur organisasi Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan terdiri dari beberapa Bagian dan Sub Dinas, yaitu :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

1. Seksi Penelitian
2. Seksi Evaluasi/Pengembangan
3. Seksi Penyuluhan

d. Sub Dinas Data dan Pemetaan terdiri dari :

1. Seksi Pengumpulan Data
2. Seksi Pengukuran
3. Seksi Pemetaan dan Geografi Informasi Sistem (GIS)

e. Sub Dinas Tata Kota :

1. Seksi Rencana Tata Ruang
2. Seksi Perencanaan Tata Letak
3. Seksi Perencanaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

f. Sub Dinas Tata Bangunan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Bangunan
2. Seksi Konstruksi Bangunan
3. Seksi Pelestarian dan Konservasi Bangunan

g. Sub Dinas Pengawasan

1. Seksi Pengawasan Operasi
2. Seksi Penindakan
3. Seksi Peradilan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan membina segala pekerjaan bidang ketatausahaan umum perlengkapan dan hubungan masyarakat.
 - b. Menyelenggarakan urusan kepegawaian.
 - c. Menyelenggarakan urusan keuangan.
2. Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Bina Program berdasarkan Kebijakan Teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas yang meliputi:
- a. Memimpin semua kegiatan-kegiatan dalam bidang perencanaan, penelitian/survey, evaluasi dan pengendalian atas perkembangan Rencana Tata Ruang Kota Medan, serta mengadakan penyuluhan kepada masyarakat.
 - b. Mengarahkan partisipasi masyarakat dan pembangunan kota.
 - c. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan penelitian dalam rangka perurusan, pengembangan dan penerapan Rencana Tata Ruang Kota dan kebijakan teknis penataan ruang kota dan bangunan.
- b. Mengadakan kegiatan evaluasi, revisi dan pengembangan Rencana Tata Ruang Kota dan pelaksanaan penataan ruang kota dan penataan bangunan

yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma penataan kota dan bangunan yang berlaku.

- c. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat menyangkut penerapan Rencana Tata Ruang Kota dan Kebijakan penataan ruang kota dan penataan bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menggali dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.

3. Sub Dinas Data dan Pemetaan mempunyai tugas :

- a. Memimpin semua kegiatan dalam bidang pengumpulan data, pengukuran tanah, pemetaan, fotogrametri dan menerapkan geografi Informasi Sistem (GIS)
- b. Memberikan saran-saran atau tindakan-tindakan yang perlu diambil hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Data dan Pemetaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan/penghimpunan data informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang kota dan kebijakan teknis penataan ruang kota dan bangunan.
- b. Melaksanakan pengukuran pemetaan dan fotogrametri rencana kota, pengukuran tanah dan ketinggian bangunan.

c. Melaksanakan pemeliharaan/perawatan dan pembaruan peta dasar, foto udara dan dokumentasi lapangan serta penerapan GIS dan pemetaan.

4. Sub Dinas Tata Kota mempunyai tugas :

a. Memimpin semua kegiatan dalam penerapan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Kota dan kebijaksanaan teknis penataan ruang dan bangunan melalui mekanisme advis plan.

b. Memimpin semua kegiatan perencanaan tata letak suatu kawasan/lokasi serta perencanaan fasilitas social dan umum.

c. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Tata Kota mempunyai fungsi :

a. Meneliti setiap lokasi permohonan IMB menyangkut Rencana Tata Ruang Kota dan kebijaksanaan teknis penataan ruang dan bangunan.

b. Merencanakan site plan (tata letak) permohonan IMB sesuai Rencana Tata Ruang Kota dan kebijaksanaan teknis penataan ruang dan bangunan.

c. Merencanakan kebutuhan fasilitas social dan umum pada suatu kawasan atau lingkungan.

d. Mempersiapkan advis plan yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.

5. Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai tugas :

- a. Memimpin semua kegiatan penertiban IMB khususnya yang menyangkut desain dan konstruksi bangunan sesuai advis plan.
- b. Memimpin semua kegiatan penelitian dan perencanaan pelestarian dan konservasi bangunan.
- c. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam hal-hal yang menyangkut bidang tugas.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Tata Bangunan mempunyai fungsi :

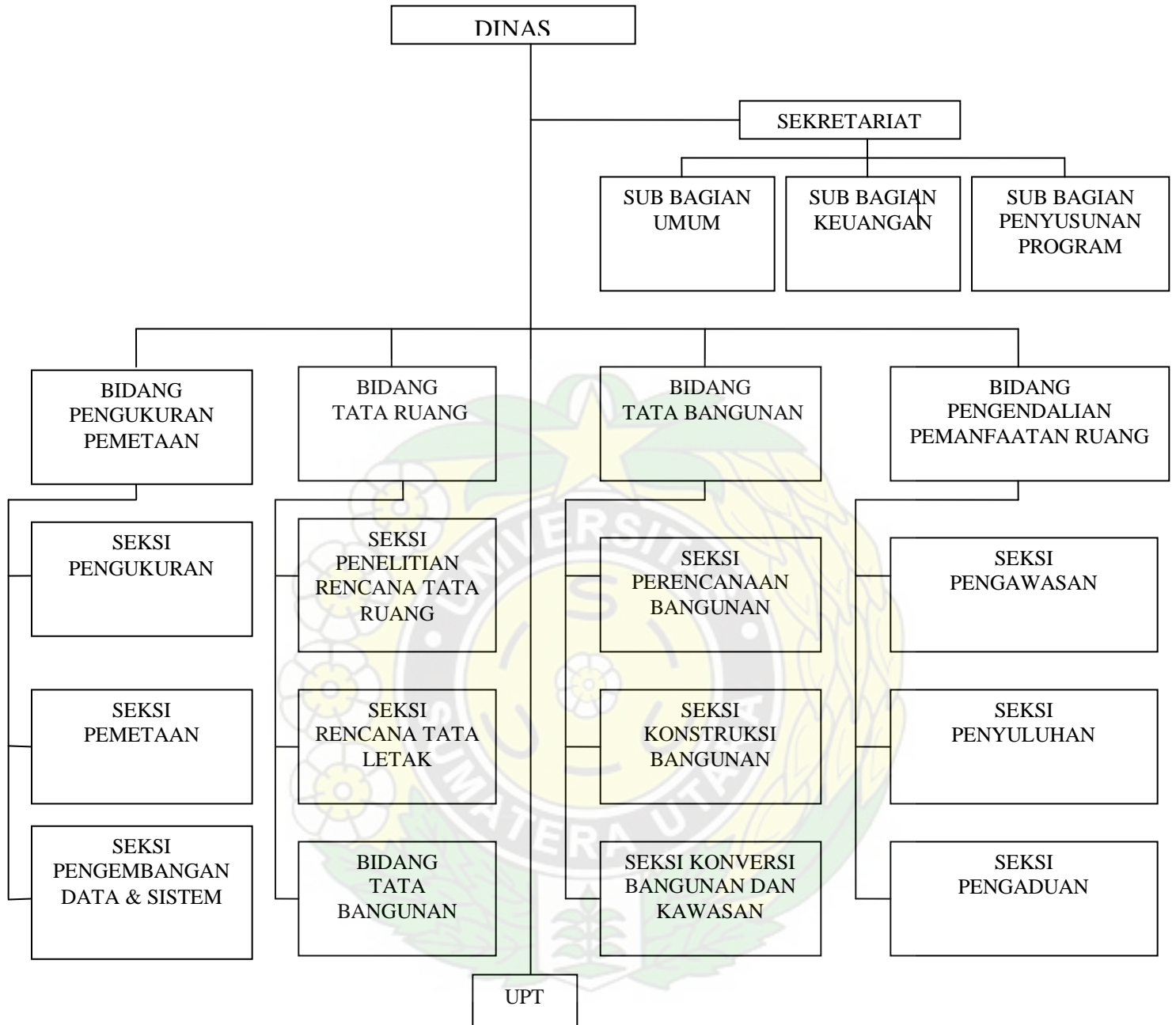
- a. Meneliti setiap permohonan IMB menyangkut disain dan konstruksi bangunan.
 - b. Memberi bimbingan kepada masyarakat menyangkut desain arsitektur, fasilitas bangunan dan konstruksi bangunan.
 - c. Mempersiapkan IMB yang akan diajukan oleh Kepala Dinas.
 - d. Mengadakan penelitian, perencanaan dan penyusunan ketentuan-ketentuan teknis pelestarian dan konservasi bangunan.
6. Sub Dinas Pengawasan mempunyai tugas :
- a. Memimpin segala kegiatan dalam bidang pengawasan pembangunan sesuai dengan IMB.
 - b. Memimpin segala kegiatan dalam penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB dan menyalahi IMB.

- c. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Dinas Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengawasan pembangunan sesuai IMB.
- b. Melaksanakan penindakan/penertiban terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB dan menyalahi IMB.
- c. Menampung dan mengolah pengaduan dan keberatan masyarakat yang menyangkut pembangunan fisik.
- d. Melaksanakan proses hukum terhadap keberatan masyarakat menyangkut penindakan/penertiban yang dilaksanakan.

Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4. Sistem Akuntansi pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

1). Analisis Transaksi

a. Pendapatan

Pendapatan adalah Semua Penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Penerimaan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan berasal dari retribusi. Untuk tahun anggaran 2007 terdiri dari :

- Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan Bangunan
- Pendapatan Retribusi Cetak Peta
- Pendapatan Retribusi IMB
- Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan
- Penerimaan lainnya yang merupakan pengembalian Gaji
- Tunjangan dari Pegawai yang telah memasuki masa pensiun

Untuk tahun anggaran 2008 terdiri dari :

- Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan Bangunan
- Pendapatan Retribusi Cetak Peta
- Pendapatan Retribusi IMB
- Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan
- Penerimaan Izin Peletakan Bahan.

b. Belanja

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

Belanja adalah semua pengeluaran pada satu periode Anggaran. Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain :

- a). Belanja Administrasi Umum yaitu pengeluaran yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan.
- b). Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik yaitu semua pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan publik.
- c). Belanja Modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan dan selanjutnya akan menambah biaya yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan.

Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan untuk Tahun Anggaran 2007, terdiri dari :

- a). Belanja administrasi umum, terdiri dari :
 - Belanja pegawai; yaitu yang berhubungan langsung dengan pegawai, berupa gaji dan tunjangan.
 - Belanja barang; yaitu merupakan pengeluaran untuk penyediaan Barang dan Jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik, antara lain : Biaya Bahan Pakai Habis berupa listrik, air dan telepon.
 - Belanja Cetak dan Penggandaan rencana Anggaran dan belanja Jasa Konsultan independent.
 - Belanja Pemeliharaan, yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan barang yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik antara lain :

belanja kebersihan kantor, belanja pemeliharaan mobiler kantor, biaya pemeliharaan peralatan kantor.

b). Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, antara lain : Belanja Pegawai yang sifatnya *variable* (tidak tetap) antara lain : Belanja Tambahan Penghasilan PNS berupa Uang makan, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Kepala Dinas dan Tunjangan Khusus Bendahara.

c). Belanja Modal, terdiri dari :

- Belanja Tanah Jalan Pembangunan Fly Over Amplas
- Belanja Tanah Jalan (Gag Warga)

Pengeluaran Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan untuk Tahun Anggaran 2008, terdiri dari :

a). Belanja Administrasi Umum, terdiri dari :

- Belanja Pegawai, berupa Gaji dan Tunjangan.
- Belanja Barang dan Jasa, berupa pembelian Alat Tulis Kantor dan Cetakan.

b) Belanja Modal, terdiri dari 2 item yaitu :

- Belanja Modal Tanah terdiri dari : Ganti Rugi Tanah Pembangunan Fly Over Amplas dan Pelebaran Gang Warga serta Pelebaran Jembatan Tanjung Selamat, Pembangunan Medan Islamic Centre, penataan runag terbuka hijau dan penataan taman pemakaman umum.
- Belanja Modal Mesin/ Peralatan terdiri dari : pembelian komputer dan mesin penghancur kertas.

c. Asset

Asset yang dimaksud disini adalah asset tetap. Asset tetap yang dimiliki Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Tahun Anggaran 2007 berupa tanah.

Asset tetap yang dimiliki Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan tahun Anggaran 2008, terdiri dari : tanah, peralatan kantor, dan komputer.

2). Jurnal

Berdasarkan bukti-bukti transaksi yang diserahkan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, PPK-SKPD akan melakukan penjurnalan. Jurnal-jurnal yang telah dibuat antara lain:

a. Akuntansi Pendapatan

Contoh jurnal untuk akuntansi pendapatan yang terjadi di Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 26 Juli, tanggal 29 Agustus, dan tanggal 1 september 2007 PPK-SKPD menerima SPJ penerimaan dan lampirannya dari bendahara penerimaan, PPK-SKPD mencatat transaksi-transaksi tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Tgl	Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
26 Juli 2007	1.1.1.02.01	Kas dibendahara Penerimaan	988.155.476	-
	4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi Izin Peletakan bahan	-	15.417.000
	4.1.2.01.09	Pendapatan Retribusi cetak peta	-	1.500.000
	4.1.2.02.01	Pendapatan retribusi perubahan peruntukan tanah	-	98.889.187
	4.1.2.03.01	Pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	872.349.289
29 Agst 2007	1.1.1.02.01	Kas dibendahara Penerimaan	1.185.643.769	-
	4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi Izin Peletakan bahan	-	8.949.000
	4.1.2.01.09	Pendapatan Retribusi cetak peta	-	1.290.000
	4.1.2.02.01	Pendapatan retribusi perubahan peruntukan tanah	-	257.654334
	4.1.2.03.01	Pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	917.750.435
1 Okt 2007	1.1.1.02.01	Kas dibendahara Penerimaan	555.257.804	-
	4.1.2.01.01	Pendapatan Retribusi Izin Peletakan bahan	-	4.664.000
	4.1.2.01.09	Pendapatan Retribusi cetak peta	-	1.380.000
	4.1.2.02.01	Pendapatan retribusi perubahan peruntukan tanah	-	14.763.484
	4.1.2.03.01	Pendapatan retribusi IMB	-	534.470.320

Masing-masing pendapatan yang diterima tersebut kemudian disetor kepada Kas Daerah pada hari yang bersangkutan. PPK-SKPD kemudian mencatat transaksi penyetoran tersebut dengan jurnal :

Tgl	Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
26 Juli 2007	1.1.1.01.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	988.155.476	-
	1.1.102.01	Kas dibendahara Penerimaan	-	988.155.476
29 Agst 2007	1.1.1.01.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	1.185.643.769	-
	1.1.1.02.01	Kas dibendahara Penerimaan	-	1.185.643.769
1 Okt 2007	1.1.1.01.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	555.257.804	-
	1.1.1.02.01	Kas dibendahara Penerimaan	-	555.257.804

b. Akuntansi Belanja

Contoh jurnal untuk akuntansi belanja yang terjadi di Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah sebagai berikut :

-Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU)

Pada tanggal 2 Oktober, 5 Oktober, 10 Desember 2007, PPK-SKPD menerima uang atas pencairan SP2D Uang Persediaan (UP).Maka PPK-SKPD membuat jurnal :

Tgl	Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
2 Okt 2007	1.1.1.03.01	Kas di bendahara Pengeluaran	31.500.000	-
	1.1.101.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	-	31.500.000
5 Okt 2007	1.1.1.03.01	Kas di bendahara Pengeluaran	21.600.000	-
	1.1.101.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	-	21.600.000
10 Des 2007	1.1.1.03.01	Kas di bendahara Pengeluaran	10.000.000	-
	1.1.101.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	-	10.000.000

Secara berkala, PPK-SKPD menerima SPJ dari Bendahara Pengeluaran. SPJ tersebut dilampiri dengan bukti transaksi atas pemakaian Uang Persediaan tersebut, maka berdasarkan SPJ dan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD menjurnal sebagai berikut :

Tgl	Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
27 Des 2007	5.2.1.02.01	Belanja Service Peralatan Kantor	10.000.000	-
	1.1.1.03.01	Kas di bendahara pengeluaran	-	10.000.000
28 Des 2007	5.2.2.02.02	Belanja Honor PHL/tidak tetap	31.500.000	-
	1.1.1.03.01	Kas di bendahara pengeluaran	-	31.500.000
28 Des 2007	5.2.2.02.02	Belanja Honor TNI yang diperbantukan	21.600.000	-
	1.1.1.03.01	Kas di bendahara pengeluaran	-	21.600.000

-Akuntansi Belanja LS (Langsung) :

Pada tanggal 28 Des diterima SP2D LS untuk belanja ATK (Alas Tulis Kantor), dan untuk belanja cetakan dan penggandaan , kemudian diterima SP2D untuk Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian harga tanah Lokasi Islamic Center, Belanja Jasa Konsultan pembuatan peta lokasi tanah Islamic Center, Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian harga tanah Pelebaran Jembatan Tanjung Selamat, Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian Harga Tanah pertapakan kantor pemerintah, Belanja Jasa Konsultan/Appraisal penilaian harga tanah Lokasi Perkuburan/Pemakaman.

PPK-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:

Tgl	Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
28 Des 2007	5.2.2.03.15	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor)	80.913.420	-
	1.1.101.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	-	80.913.420
28 Des 2007	5.2.1.06.01	Belanja Cetakan dan Penggandaan	71.577.250	-
	1.1.1.02.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	-	71.577.250
28 Des 2007	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian harga tanah Lokasi Islamic Center	50.000.000	-
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan pembuatan peta lokasi tanah Islamic Center	49.000.000	-
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian harga tanah Pelebaran Jembatan Tanjung Selamat	17.500.000	-
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian Harga Tanah pertapakan kantor pemerintah	49.000.000	-
	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Konsultan/Appraisal penilaian harga tanah Lokasi Perkuburan/Pemakaman	40.000.000	-
	1.1.1.01.01	Rek. Kas Daerah (PPKD)	-	205.000.000

c. Akuntansi Asset

contoh belanja modal yang menghasilkan asset tetap antara lain :

Pada tanggal 20 November 2007 Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan melakukan belanja modal tanah untuk ganti rugi pelurusan gang warga, dan pada tanggal 27 November 2007 melakukan belanja modal tanah untuk ganti rugi Fly Over Amplas, maka dibuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal untuk mencatat belanja modal:

Tgl	Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
20 Nov 2007	3.2.3.01.32	Belanja Modal Tanah (Ganti rugi Pelurusan Gang Warga)	175.640.700	-
	1.1.1.03.01	Kas di bendahara pengeluaran	-	175.640.700
27 Nov 2007	3.2.3.01.32	Belanja Modal Tanah (Ganti rugi Fly Over Amplas)	109.788.200	-
	1.1.1.03.01	Kas di bendahara pengeluaran	-	109.788.200

Jurnal “korolari” untuk mencatat penambahan nilai asset:

Tgl	Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
20 Nov 2007	1.3.1.01.32	Aset Tanah Jalan	175.640.700	-
	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam asset tetap	-	175.640.700
27 Nov 2007	1.3.1.01.32	Aset Tanah Jalan	109.788.200	-
	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam asset tetap	-	109.788.200

3). Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan penjurnalan, maka secara periodik (bulanan) PPK-SKPD melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing. Contoh buku besar yang telah disusun adalah sebagai berikut (diambil berdasarkan contoh jurnal) :

BUKU BESAR

SKPD : DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN

NAMA REKENING : REKENING KAS DAERAH (PPKD)

KODE REKENING : 1.1.1.01.01

PAGU APBD : Rp.

PAGU PERUBAHAN APBD : Rp.

TGL	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT	SALDO
26 Juli 2007	Kas di bendahara Penerimaan	1	988.155.476	-	
29 Agst 2007	Kas di bendahara Penerimaan	1	1.185.643.769	-	
1 Okt 2007	Kas di bendahara Penerimaan	1	555.257.804	-	
2 Okt 2007	Kas di bendahara Pengeluaran	1	-	31.500.000	
28 Des 2007	Belanja ATK (Alat Tulis Kantor)	1	-	80.913.420	
28 Des 2007	Belanja Cetakan dan Penggandaan	1	-	71.577.250	
28 Des 2008	Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian harga tanah Lokasi Islamic Center	1	-	50.000.000	
28 Des 2008	Belanja Jasa Konsultan pembuatan peta lokasi tanah Islamic Center	1	-	49.000.000	
28 Des 2008	Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian harga tanah Pelebaran Jembatan Tanjung Selamat	1	-	17.500.000	
28 Des 2008	Belanja Jasa Konsultan/Appraisal Penilaian Harga Tanah pertapakan kantor pemerintah	1	-	49.000.000	
28 Des 2008	Belanja Jasa Konsultan/Appraisal penilaian harga tanah Lokasi Perkuburan/Pemakaman	1	-	40.000.000	
	JUMLAH		2.729.057.049	389.490.670	2.339.566.379

BUKU BESAR

SKPD : DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
 NAMA REKENING : REKENING KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
 KODE REKENING : 1.1.1.03.01
 PAGU APBD : Rp.
 PAGU PERUBAHAN APBD : Rp.

TGL	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT	SALDO
2 Okt 2007	Rek. Kas Daerah (PPKD)	2	31.500.000	-	
2 Okt 2007	Belanja Honor PHL	2	-	31.500.000	
20 Nov 2007	Belanja Modal Tanah (Ganti rugi Pelurusan Gang Warga)	2	-	175.640.700	
27 Nov 2007	Belanja Modal Tanah (Ganti rugi Fly Over Amplas)	2	-	109.788.200	
	JUMLAH				0

BUKU BESAR

SKPD : DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
 NAMA REKENING : REKENING KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
 KODE REKENING : 1.1.1.02.01
 PAGU APBD : Rp.
 PAGU PERUBAHAN APBD : Rp.

TGL	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT	SALDO
-----	--------	-----	-------	--------	-------

26 Juli 2007	Rek. Kas Daerah (PPKD)	3	988.155.476	988.155.476	
29 Agst 2007	Rek. Kas Daerah (PPKD)	3	1.185.643.769	1.185.643.769	
1 Okt 2007	Rek. Kas Daerah (PPKD)	3	555.257.804	555.257.804	
	JUMLAH		2.729.057.049	2.729.057.049	

4). Neraca Saldo

Setiap akhir periode akuntansi PPK-SKPD Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan menyusun neraca saldo, contoh neraca saldo yang telah disusun adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
		Debit	Kredit
1.1.1.01.01	Rekening Kas Daerah (PPKD)	2.339.566.379	-
1.1.1.02.01	Kas di bendahara Penerimaan	0	
1.1.1.03.01	Kas di bendahara Pengeluaran	0	
		2.339.566.379	

5). Jurnal Penyesuaian

Pada Belanja Tambahan Penghasilan bagi PNS berupa Uang Makan, Tunjangan Kesjahteraan, Tunjangan Kadis dan Tunjangan Bendahara pada pengeluaran kas tanggal 25 agustus 2007, Tanggal 10 Oktober dan 25 OKtober 2007 telah tercatat nilai netto yang mengakibatkan tidak dicatat sebagai

penerimaan pajak (PPh 21). Maka pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut :

Tgl	Nomor Rekening	Keterangan	Debet	Kredit
28 Des 2008	2.11.03.01	Hutang Pajak PPh 21	10.818.000	-
	2.11.03.01	Hutang Pajak PPh 21	2.700.000	-
	2.11.03.01	Hutang Pajak PPh 21	225.000	-
	1.1.101.01	Kas di bendahara Pengeluaran	-	13 743.000

6). Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah dilakukan posting atas jurnal penyesuaian, maka ada beberapa saldo dari perkiraan mengalami perubahan dan juga terdapat penambahan rekening baru.

Saldo perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru itu akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.

7). Laporan Keuangan

Setelah Neraca Saldo setelah penyesuaian disusun, maka langkah selanjutnya PPK-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian masing-masing Laporan Keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan data penelitian dalam Lampiran 1 & Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 & 2008 terdiri dari :

a. Pos Pendapatan

Pada pos pendapatan terbagi atas :

- Pendapatan Asli Daerah
- Pendapatan Transfer
- Lain-lain Pendapatan yang sah

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2007 menunjukkan bahwa seluruh penerimaan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan berasal dari retribusi. Pendapatan Retribusi tersebut ditargetkan sebesar Rp. 21.028.000.000,- yang terealisasi hanya sebesar Rp. 16.294.757.311,- atau sekitar 78 % yang terdiri dari :

- Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan Bangunan Rp 189.626.025
- Pendapatan Retribusi Izin Cetak Peta Rp 17.210.000
- Pendapatan Retribusi IMB Rp 11.680.138.076
- Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan Rp 4.407.783.210
- Penerimaan lainnya yang berasal dari pengembalian Gaji dan Tunjangan dari Pegawai yang telah memasuki masa pension sebesar Rp 6.246.668

Untuk tahun Anggaran 2008 Pendapatan Retribusi tersebut ditargetkan sebesar Rp 25.190.000.000,- yang terealisasi hanya sebesar Rp 16.294.757.311,- sekitar 82 % terdiri dari :

- Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan Bangunan Rp 189.626.025,-
- Pendapatan Retribusi Cetak Peta Rp 23.320.000,-
- Pendapatan Retribusi IMB Rp 16.442.158.713,-
- Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan Rp 3.949.869.964,-
- Pendapatan Izin Peletakan Bahan sebesar Rp 200.563.650,-

b. Pos Belanja

Pada pos belanja terbagi atas :

- Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Tidak Terduga

Total realisasi belanja tahun anggaran 2007 menunjukkan angka sebesar Rp 13.395.542.426 dari total anggaran sebesar Rp 129.688.066.123, atau sebesar 10 % dari jumlah yang dianggarkan yang terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp 4.951.034.569
- Belanja Modal Rp 8.239.007.857

Untuk tahun anggaran 2008 menunjukkan angka sebesar Rp 15.677.329.238 dari total anggaran sebesar Rp 123.457.081.600 yang terdiri dari :

- Belanja Operasi Rp 8.075.455.849
- Belanja Modal Rp 7.601.873.389

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2007 sebesar Rp 2.905.461.553, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 4.938.583.089.

2. Neraca

Berdasarkan data penelitian dalam lampiran 3, Neraca Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan Tahun Anggaran 2007 & Tahun Anggaran 2008 menunjukkan bahwa :

- Tahun 2007 Asset yang dimiliki Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan sebesar Rp 11.144.469.410 yang terdiri dari :Asset Lancar sebesar Rp 2.905.461.553 dan Asset Tetap sebesar Rp 8.239.007.857. Tidak ada kewajiban, sedangkan Ekuitas Dana sebesar Rp 11.144.469.410.

- Tahun 2008 Asset yang dimiliki Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan sebesar Rp 12.540.456.478 yang terdiri dari : Asset Lancar sebesar Rp 4.938.583.089 & Asset Lancar sebesar Rp 7.601.873.389. Tidak ada kewajiban, sedangkan Ekuitas Dana sebesar Rp 12.540.456.478.

3. Laporan Arus Kas

Berdasarkan data penelitian dalam lampiran 4 & lampiran 5, Laporan Arus Kas Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan menunjukkan bahwa :

- Untuk Tahun Anggaran 2007 Penerimaan dari aktivitas Operasi terdiri dari Retribusi Izin Peletakan Bahan, Pendapatan Retribusi Cetak Peta, Pendapatan Retribusi IMB dan pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan dengan jumlah

sebesar Rp. 16.294.757.311,- dan pengeluaran adalah belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.138.242.742,-

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tidak ada sedang kas keluar diinvestasikan kepada tanah pembangunan Fly Over Amplas dan Pelurusan Gang Warga sebesar Rp. 8.239.007.857,-

Saldo Kas akhir berada pada Rekening Kas Daerah (PPKD) sebesar Rp. 2.899.234.885,-

- Untuk Tahun Anggaran 2008 Penerimaan dari aktivitas Operasi terdiri dari Retribusi Izin Peletakan Bahan, Pendapatan Retribusi Cetak Peta, Pendapatan Retribusi IMB dan Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan dengan jumlah sebesar Rp 20.615.912.327,- dan Pengeluaran adalah belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp 8.075.455.849,-

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tidak ada sedang kas keluar diinvestasikan Tanah Pembangunan Fly Over Amplas dan Pelurusan Gang Warga serta pelebaran jembatan Tanjung Selamat dan pembelian peralatan dan mesin berupa komputer dan mesin penghancur kertas sebesar Rp 7.601.873.389,-

Saldo kas akhir berada pada Rekening Kas Daerah (PPKD) sebesar Rp 4.938.583.089,-.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data penelitian dalam Lampiran 6, Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2007 & 2008 menyajikan informasi mengenai :

- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target
- Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- Kebijakan Akuntansi
- Penjelasan Laporan pos-pos keuangan
- Penjelasan atas informasi non keuangan.

8). Jurnal Penutup

Setelah menyusun Laporan Keuangan tahunan, maka PPK-SKPD membuat jurnal penutup yang tujuannya untuk menutup saldo perkiraan nominal agar tidak terbawa periode berikutnya.

Berikut ini jurnal penutup Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan untuk tahun anggaran 2008.

BUKU JURNAL PENUTUP
 SKPD DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
 TAHUN ANGGARAN 2008

NOMOR REKENING	KETERANGAN	JUMLAH	
		DEBET	KREDIT
4.1.2.01.09	Pendapatan Retribusi Cetak Peta	23.320.000	-
4.1.2.02.01	Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan Tanah	3.949.869.964	-
4.1.2.02.01	Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan	200.563.650	-
4.1.2.03.01	Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	16.442.158.713	-
3.1.1.01.01	SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	-	20.615.912.327
3.1.1.01.01	SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)	15.677.329.238	-
5.1.1.01.01	Gaji Pokok	-	3.174.376.560
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	-	380.214.819
5.1.1.01.03	Tunjangan Struktural	-	229.095.000
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	-	271.910.000
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	-	257.296.220
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh	-	78.227.075
5.1.1.01.08	Pembulatan	-	97.105
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	-	65.196.149
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja	-	656.332.500
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Pertimbangan Obyektif	-	318.740.000
5.2.1.01.01	Belanja Pegawai-Honor Panitia Pelaksana Kegiatan RDTR	-	63.950.000
5.2.1.01.03	Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Renja	-	2.975.000
5.2.1.01.03	Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Lakip	-	2.975.000

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

5.2.1.01.03	Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Lap. Keu	-	4.200.000
5.2.1.02.02	Belanja Pegawai-Honor PHL	-	134.028.000
5.2.1.02.03	Belanja Pegawai-Honorarium Tenaga Pengawas Non PNS	-	72.000.000
5.2.1.02.03	Belanja Pegawai-Upah Tenaga Kebersihan	-	9.000.000
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai-Biaya Pendidikan	-	5.500.000
5.2.2.01.01	Belanja Barang Jasa-ATK Penyusunan Renja	-	849.800
5.2.2.01.01	Belanja Barang Jasa-ATK Penyusunan Lakip	-	849.800
5.2.2.01.01	Belanja Barang Jasa-ATK Penyusunan Lap.Keu	-	2.299.875
5.2.2.01.01	Belanja Barang Jasa-ATK	-	72.442.286
5.2.2.01.02	Belanja Barang Jasa-Dok.administrasi Tender	-	23.025.990
5.2.2.01.05	Belanja Barang Jasa-Alat Kebersihan dan Alat Pembersih	-	1.000.000
5.2.2.03.06	Belanja Barang Jasa-Internet	-	10.406.470
5.2.2.03.17	Belanja Barang Jasa-Jasa Konsultan Peny.RDTR Kecamatan	-	2.144.300.950
5.2.2.06.01	Belanja Barang Jasa-Barang Cetakan	-	71.961.250
5.2.2.06.02	Belanja Barang Jasa-Fotocopy	-	190.000
5.2.2.06.07	Belanja Barang Jasa-Cetak dan Penggandaan Peny.Renja	-	750.000
5.2.2.06.07	Belanja Barang Jasa-Cetak dan Penggandaan Peny.Lakip	-	750.000
5.2.2.06.07	Belanja Barang Jasa-Cetak dan Penggandaan Peny.Lap.Keu	-	2.000.000
5.2.2.18.04	Belanja Barang Jasa-Pemeliharaan Mobiler(Lemari Arsip)	-	9.424.000
NOMOR REKENING	KETERANGAN	JUMLAH	
		DEBET	KREDIT
5.2.2.18.05	Belanja Barang Jasa-Perawatan Jaringan Komputer & Pendukung	-	9.092.000
5.2.3.01.32	Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pemb. Jembatan)	-	280.974.000
5.2.3.01.34	Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pemb.Fly Over Amplas)	-	6.545.925.891
5.2.3.01.34	Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pemb.Gang Warga)	-	729.223.496
5.2.3.10.08	Belanja Modal-Mesin Penghancur Kertas	-	4.500.000
5.2.3.12.02	Belanja Modal-Komputer PC	-	10.250.000
5.2.3.12.03	Belanja Modal-Komputer Note Book	-	31.000.000
	Jumlah	36.293.241.565	36.293.241.565

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Pencatatan

a. Penerapan Akuntansi Pendapatan

Sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan daerah yang ada di

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan sudah dirinci menurut Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Demikian juga akuntansi pendapatan juga sudah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu mencatat sebesar harga bruto, bukan angka setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Pendapatan yang diterima dalam satu hari langsung disetor ke kas daerah pada hari yang sama.

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan di buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun laporan keuangan dan juga membuat jurnal penutup.

b. Penerapan Akuntansi Belanja

Pencatatan belanja di Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah baik untuk belanja Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU) maupun untuk belanja LS-Gaji dan Tunjangan dan LS-Barang dan Jasa. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting ke perkiraan di buku besar, penyusunan neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, menyusun Laporan keuangan dan juga membuat jurnal penutup.

c. Penerapan Akuntansi Asset

Asset yang dimaksud disini adalah asset tetap. Akuntansi asset merupakan lanjutan dari pencatatan akuntansi belanja yang menghasikan Asset tetap.

Akuntansi asset pada Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan asset dan pengurangan nilai asset. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006.

2. Analisis Pelaporan Keuangan

Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan telah menyusun Laporan Keuangan tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- 1). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan belanja yang diperbandingkan dengan anggarannya selama satu tahun anggaran.
- 2). Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana pada saat (tanggal) akhir tahun anggaran.
- 3). Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran selama satu tahun anggaran.
- 4). Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target
 2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
4. Kebijakan akuntansi
5. Informasi rinci tentang pos-pos dalam laporan keuangan



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan kota Medan telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan baik untuk akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi asset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan pencatatan tersebut

meliputi : Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo, Jurnal Penyesuaian, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dan Jurnal Penutup.

Kegiatan pencatatan tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan) berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

2. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya Tahun Anggaran 2007 & 2008) terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan secara tepat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Ditinjau dari Laporan Keuangan Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dua tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2007 & Tahun Anggaran 2008 terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah karena pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seharusnya tidak perlu membuat Laporan Arus Kas, karena kepala SKPD bukanlah pengguna uang/kas.

B. Saran

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk tahun Anggaran berikutnya hendaknya Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan dalam pengelolaan Keuangan Daerah telah berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada, agar pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar

efektif dapat terwujud dan Laporan Keuangan yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

2. Perlu adanya sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Sumber Daya Manusia ini dapat diperoleh melalui perekrutan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta melakukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis terhadap SDM yang sudah ada.
3. Bagi setiap SKPD hendaknya menggunakan sistem komputerisasi yang dapat mempermudah pekerjaan pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan dan memanfaatkannya bagi pengendalian manajemen keuangan daerah .

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, 2006. *Paparan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*.
- Erlina, 2008. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*, USU Press, Medan.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Terbitan Pertama, USU Press, Medan.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Departemen Akuntansi, 2004. *Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Medan.
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Harianja, Rioldinar, 2008. *Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.

Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, penerbit Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, penerbit Andi, Yogyakarta.

_____, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, penerbit Andi, Yogyakarta.

Munir Dasril, Henry Arys Djuanda, Hessel Nogi S.Tangkilisan, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, penerbit YPAPI, Yogyakarta.

Pangesti, Karunia Sari Nur, 2008, *Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan SKPD: studi kasus penerapan permendagri nomor 13 tahun 2006 di pemerintah daerah kabupaten Batang*, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah Dalam Otonomi*, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekarwo, 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance*, cetakan pertama. Airlangga University Press, Surabaya.

Yani, Ahmad, 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, edisi revisi, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

_____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

www.google.com

Lampiran 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD DINAS TATA KOTA TATA BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN : 2007

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah				
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor				
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah				
1.1.2.1	Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan	10.000.000	189.626.025	179.626.025	18,96
1.1.2.2	Pendapatan Retribusi Cetak Peta	18.000.000	17.210.000	(790.000)	0,96
1.1.2.3	Pendapatan Retribusi IMB	15.500.000.000	11.680.138.076	(3.819.861.924)	0,75
1.1.2.4	Pendapatan Retribusi Izin Perubahan Peruntukan	5.500.000.000	4.407.783.210	(1.092.216.790)	0,80
1.2	PENDAPATAN TRANSFER				
1.2.1	Transfer Dana Pusat –Dana Perimbangan				
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	-	-	-	
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1.3.1	Pendapatan Hibah				
1.3.2	Pendapatan Lainnya				
1.3.2.1	Pengembalian Gaji dan Tunjangan	-	6.246.668	6.246.668	
	Jumlah Penerimaan	21.028.000.000	16.301.003.979	(4.726.996.021)	0,78
2	BELANJA				
2.1	BELANJA OPERASI				
2.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.005.191.623	3.867.793.633	(137.397.990)	0,97
2.1.1.1	Belanja Gaji Pokok		2.669.943.920		
2.1.1.2	Belanja Tunjangan Istri/Suami		215.898.084		

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

2.1.1.3	Belanja Tunjangan Anak		84.406.792		
2.1.1.4	Belanja Tunjangan Struktural		211.320.000		
2.1.1.5	Belanja Tunjangan Fungsional		246.200		
2.1.1.6	Belanja Tunjangan Umum		257.377.000		
2.1.1.7	Belanja Tambahan Tunjangan Umum		-		
2.1.1.8	Belanja Tunjangan Beras		273.244.630		
2.1.1.9	Belanja Tunjangan PPh		45.736.986		
2.1.1.10	Belanja Pembulatan		108.383		
2.1.1.11	Belanja Iuran Asuransi Kesehatan		55.158.594		
2.1.1.12	Belanja Tunjangan Keluarga		21.963.044		
2.1.1.13	Belanja Tunjangan Jabatan		32.390.000		
2.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	645.010.000	621.320.000	(23.690.000)	0,96
2.1.2.1	Belanja Tambahan Penghasilan PNS (Uang Makan)		162.435.000		
2.1.2.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS (Uang Kesejahteraan)		368.885.000		
2.1.2.3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS (Tunjangan Kadis)		72.000.000		
2.1.2.4	Belanja Tambahan Penghasilan PNS (Tunjangan Bendahara)		18.000.000		
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
2.1.3	Belanja/Honor TNI yang diperbantukan	93.600.000	86.400.000	(7.200.000)	0,92
2.1.4	Belanja Honor PHL/Tidak Tetap	147.600.000	140.760.000	(6.840.000)	0,95
2.1.2.1	Belanja Bahan dan Alat Pembersih		1.173.000		
2.1.2.2	Belanja Jasa Honorarium Kebersihan Kantor		3.000.000		
2.1.3	Belanja Perbaikan Mobiler kantor	2.000.000	2.000.000		1,00
2.1.3.1	Belanja Bahan Baku untuk Bangunan (Mobiler)		1.000.000		
2.1.3.2	Belanja Upah Tukang Mobiler Kantor		1.000.000		
2.1.4	Belanja Telp, Air, Listrik dan Internet	78.000.000	46.097.266	(31.902.734)	0,59
2.1.4.1	Belanja Telepon		2.370.584		
2.1.4.2	Belanja Air		5.001.105		
2.1.4.3	Belanja Listrik		26.435.220		
2.1.4.4	Belanja Internet		12.290.357		
2.1.5	Belanja Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000	10.000.000		1,00
2.1.5.1	Belanja Honor Panitia Pelaksana		2.400.000		
2.1.5.2	Belanja ATK		3.333.000		
2.1.5.3	Belanja Cetak		950.000		
2.1.5.4	Belanja Penggandaan		317.000		
2.1.5.5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.000.000		
2.1.6	Belanja Pembuatan Rencana Kerja (RENJA)	5.000.000	5.000.000		1,00
2.1.6.1	Belanja Honor Panitia Pelaksana Pembuatan Renja		2.175.000		
2.1.6.2	Belanja ATK Pembuatan Renja		380.000		
2.1.6.3	Belanja Cetak Pembuatan Renja		900.000		
2.1.6.4	Belanja Penggandaan Pembuatan		45.000		

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

	Renja				
2.1.6.5	Belanja Makanan dan Minuman Pembuatan Renja		1.500.000		
2.1.7	Belanja Pembuatan LAKIP	5.000.000	5.000.000		1,00
2.1.7.1	Belanja Honor Panitia Pelaksana		2.175.000		
2.1.7.2	Belanja ATK		394.000		
2.1.7.3	Belanja Cetak		1.200.000		
2.1.7.4	Belanja Penggandaan		31.000		
2.1.7.5	Belanja Makanan dan Minuman		1.200.000		
2.1.7.6	Belanja Alat Tulis Kantor	108.017.900	80.913.420	(27.104.480)	0,75
2.1.7.7	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.827.200	71.577.250	(72.249.950)	0,50
2.2	BELANJA MODAL				
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa Ganti Rugi Pemb. Fly Over Amplas	173.501.100	160.095.800	(13.405.300)	0,92
2.2.1.1	Belanja Panitia		1.500.000		
2.2.1.2	Belanja Adm dan Tim Teknis		52.890.000		
2.2.1.3	Belanja ATK		38.680.550		
2.2.1.4	Belanja Perangko dan Materai		4.980.000		
2.2.1.5	Belanja Transport		24.500.000		
2.2.1.6	Belanja Cetak		15.872.750		
2.2.1.7	Belanja Penggandaan		6.350.000		
2.2.1.8	Belanja Makan dan Minum		15.322.500		
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
2.2.2	Belanja Tanah Jalan Pemb. Fly Over Amplas	9.440.980.400	4.499.657.507	(4.941.322.893)	0,48
2.2.3	Belanja Baarang dan Jasa Ganti Rugi Pemb. Gang Warga	129.937.850	113.295.250	(16.642.600)	0,87
2.2.3.1	Belanja Panitia		6.000.000		
2.2.3.2	Belanja Adm dan Tim Teknis		31.170.000		
2.2.3.3	Belanja ATK		28.542.000		
2.2.3.4	Belanja Perangko dan Materai		4.980.000		
2.2.3.5	Belanja Transport		17.500.000		
2.2.3.6	Belanja Cetak		9.509.250		
2.2.3.7	Belanja Penggandaan		3.804.000		
2.2.3.8	Belanja Makan dan Minum		11.250.000		
2.2.4	Belanja Tanah Jalan (Gang Warga)	5.883.961.150	3.465.959.300	(2.418.001.850)	0,59
2.2.5	Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Lokasi Islamic Center	50.000.000	50.000.000	-	1,00
2.2.6	Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Peta Lokasi Islamic Center	49.000.000	49.000.000	-	1,00
2.2.7	Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Jembatan Tanjung Selamat	17.500.000	17.500.000	-	1,00
2.2.8	Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Kantor Pemerintah	49.000.000	49.000.000	-	1,00
2.2.9	Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Pemakaman Umum	40.000.000	40.000.000	-	1,00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	
	Belanja yang tidak terealisasi	108.596.765.900	-	(108.596.765.900)	
	Jumlah Belanja	129.688.066.123	13.395.542.426	(116.292.523.697)	
	Surplus/Defisit	-	2.905.461.553	-	
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
3.1.1	Penggunaan Silpa Tahun Lalu	-	-	-	

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

3.1.2	Pinjaman	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Penyertaan Modal	-	-	-	
3.2.2	Pembayaran Pinjaman	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	
	Pembiayaan Netto	-	-	-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	2.905.461.553	-	

Lampiran 2

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
SKPD DINAS TATA KOTA TATA BANGUNAN
TAHUNA ANGGARAN 2008

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
1	PENDAPATAN	25.190.000.000	20.615.912.327	(4.574.087.673)	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	25.190.000.000	20.615.912.237	(4.574.087.673)	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	25.190.000.000	20.615.912.327	(4.574.087.673)	
1.1.2.1	Pendapatan Retribusi Cetak Peta	10.000.000	23.320.000	13.320.000	2,33
1.1.2.2	Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan Tanah	6.500.000.000	3.949.869.964	(2.550.130.036)	0,61
1.1.2.3	Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan	180.000.000	200.563.650	20.563.650	1,11
1.1.2.4	Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	18.500.000.000	16.442.158.713	(2.057.841.287)	0,89
	Jumlah Penerimaan	25.190.000.000	20.615.912.327	(4.574.087.673)	0,82
2	BELANJA	123.457.081.600	15.677.329.238	(107.779.752.362)	
2.1	BELANJA OPERASI	9.533.081.600	8.075.455.849	(1.457.625.751)	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	6.101.621.600	5.726.113.428	(375.508.172)	
2.1.1.1	Gaji Pokok	3.295.259.175	3.174.376.560	(120.882.615)	0,96
2.1.1.2	Tunjangan Keluarga	398.626.383	380.214.819	(18.411.564)	0,95
2.1.1.3	Tunjangan Struktural	250.965.000	229.095.000	(21.870.000)	0,91
2.1.1.4	Tunjangan Umum	334.698.000	271.910.000	(62.788.000)	0,81
2.1.1.5	Tunjangan Beras	254.322.016	257.296.220	2.974.204	1,01
2.1.1.6	Tunjangan PPh	60.466.789	78.227.075	17.760.286	1,29
2.1.1.7	Pembulatan	116.482	97.105	(19.377)	0,83

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

2.1.1.8	Iuran Asuransi Kesehatan	73.877.755	65.196.149	(8.681.606)	0,88
2.1.1.9	Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja	704.190.000	656.332.500	(47.857.500)	0,93
2.1.1.10	Tambahan Penghasilan PNS Berd.Pertimbangan Objektf	359.160.000	318.740.000	(40.420.000)	0,89
2.1.1.11	Belanja Pegawai-Honor Panitia Pelaksana Keg.(Penyusunan) RDTR	63.950.000	63.950.000	-	1,00
2.1.1.12	Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Renja	2.975.000	2.975.000	-	1,00
2.1.1.13	Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Lakip	2.975.000	2.975.000	-	1,00
2.1.1.14	Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Lap. Keu	4.200.000	4.200.000	-	1,00
2.1.1.15	Belanja Pegawai-Honor PHL (tidak tetap)	165.240.000	134.028.000	(31.212.000)	0,81
2.1.1.16	Belanja Pegawai-Honorarium Tenaga Pengawasan Non PNS	93.600.000	72.000.000	(21.600.000)	0,77
2.1.1.17	Belanja Pegawai-Upah Tenaga Kebersihan	9.000.000	9.000.000	-	1,00
2.1.1.18	Belanja Pegawai-Biaya Pendidikan	28.000.000	5.500.000	(22.500.000)	0,20
2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	3.431.460.000	2.349.342.421	(1.082.117.579)	
2.1.2.1	Belanja Barang Jasa-ATK Penyusunan Renja	850.000	849.800	(200)	1,00
2.1.2.2	Belanja Barang Jasa-ATK Penyusunan Lakip	850.000	849.800	(200)	1,00
2.1.2.4	Belanja Barang Jasa-ATK	144.960.000	72.442.286	(72.527.714)	0,50
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
2.1.2.6	Belanja Barang Jasa-Alat Kebersihan dan Alat Pembersih	1.000.000	1.000.000	-	1,00
2.1.2.7	Belanja Barang Jasa-Internet	19.200.000	10.406.470	(8.793.530)	0,54
2.1.2.8	Belanja Barang Jasa-Jasa Konsultan Peny. RDTR Kecamatan	2.835.000.000	2.144.300.950	(690.699.050)	0,76
2.1.2.9	Belanja Barang Jasa-Barang Cetak	144.000.000	71.961.250	(72.038.750)	0,50
2.1.2.10	Belanja Barang Jasa-Fotocopy	4.800.000	190.000	(4.610.000)	0,04
2.1.2.11	Belanja Barang Jasa-Cetak dan Penggandaan Peny. Renja	750.000	750.000	-	1,00
2.1.2.12	Belanja Barang Jasa-Cetak dan Penggandaan Peny. Lakip	750.000	750.000	-	1,00
2.1.2.13	Belanja Barang Jasa-Cetak dan Peny.Lap.Keu	2.000.000	2.000.000	-	1,00
2.1.2.14	Belanja Barang Jasa-Pemeliharaan Mobiler (Lemari Arsip)	10.000.000	9.424.000	(576.000)	0,94
2.1.2.15	Belanja Barang Jasa-Perawatan Jaringan Komp. Dan Pendukung	15.000.000	9.092.000	(5.908.000)	0,61
2.1.2.16	Belanja Barang Jasa-Sosialisasi Pemanfaatan Ruang	130.000.000	-	(130.000.000)	-
2.1.2.17	Belanja Barang Jasa-Digitalisasi Blad Kota Medan	90.000.000	-	(90.000.000)	-
2.2	BELANJA MODAL	113.924.000.000	7.601.873.389	(106.322.126.611)	
2.2.1	BELANJA TANAH	113.826.000.000	7.556.123.389	(106.269.876.611)	
2.2.1.1	Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pemb.Jembatan)	950.000.000	280.974.000	(669.026.000)	0,30
2.2.1.2	Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pemb.Fly Over Amplas)	8.091.000.000	6.545.925.891	(1.545.074.109)	0,81

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

2.2.1.3	Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pemb. Gang Warga)	3.935.000.000	729.223.498	(3.205.776.502)	0,19
2.2.1.4	Belanja Modal-Ganti Rugi Pembangunan Medan Islamic Center	85.350.000.000	-	(85.350.000.000)	-
2.2.1.5	Belanja Modal-Ganti Rugi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10.000.000.000	-	(10.000.000.000)	-
2.2.1.6	Belanja Modal-Ganti Rugi Penataan Taman Pemakaman Umum	5.500.000.000	-	(5.500.000.000)	-
2.2.2	BELANJA PERALATAN MESIN	98.000.000	45.750.000	(52.250.000)	
2.2.2.1	Belanja Modal-Mesin Penghancur Kertas	6.750.000	4.500.000	(2.250.000)	0,67
2.2.2.2	Belanja Modal-Komputer PC	10.250.000	10.250.000	-	1,00
2.2.2.3	Belanja Modal-Komputer Note Book	31.000.000	31.000.000	-	1,00
2.2.2.4	Belanja Modal-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	50.000.000	-	(50.000.000)	-
	Jumlah Belanja	123.457.081.600	15.677.329.238	(107.779.752.362)	
	Surplus/Defisit		4.938.583.089	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	4.938.583.089	-	-

Lampiran 3

NERACA
SKPD : DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2007 & 2008

KETERANGAN	TAHUN 2008	TAHUN 2007
ASET		
ASET LANCAR		
KAS		
Kas di Kas daerah (Rek. Kas PPKD)	4.938.583.089	2.905.461.553
Kas di bendahara Penerimaan (Rek. Kas Bend. Penerimaan)	-	-
Kas di bendahara Pengeluaran (Rek. Kas Bend. Pengeluaran)	-	-
Jumlah Aset Lancar	4.938.583.089	2.905.461.553
ASET TETAP		
TANAH		
Aset Tanah-Jalan	7.556.123.389	-
PERALATAN KANTOR		
Aset peralatan kantor-Mesin Penghancur Kertas	4.500.000	8.239.007.857
KOMPUTER		
Aset Komputer-Komputer PC	10.250.000	-
Aset Komputer-Komputer Notebook	31.000.000	-
Jumlah Aset Tetap	7.601.873.389	8.239.007.857
TOTAL ASSET	12.540.456.478	11.144.469.410
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

UTANG		
Utang Pemotongan Pajak (PPh 21, 22, dan PPN)	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
UTANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah Kewajiban	-	-
EKUITAS DANA		
EKUITAS DANA LANCAR		
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam asset tetap	7.601.873.389	8.239.007.857
EKUITAS DANA CADANGAN		
SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)	4.938.583.089	2.905.461.553
Jumlah Ekuitas Dana	12.540.456.478	11.144.469.410
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	12.540.456.478	11.144.469.410

Lampiran 4

LAPORAN ARUS KAS
SKPD DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
TAHUN : 2007

URAIAN	TAHUN 2007
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS KAS MASUK	
RETRIBUSI DAERAH	
Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan	189.626.025
Pendapatan Retribusi Cetak Peta	17.210.000
Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan	11.680.138076
Pendapatan Retribusi IMB	4.407.783.210
Pendapatan Lainnya (Pengembalian Gaji dan Tunjangan)	6.246.668
JUMLAH	16.301.003.979
ARUS KAS KELUAR	
Belanja Pegawai	
Gaji dan Tunjangan	3.867.793.633
Tambahan Penghasilan	621.320.000
Belanja Barang dan Jasa	
Service Komputer	10.000.000
Kebersihan dan Alat Pembersih	4.173.000
Perbaikan Mobiler Kantor	2.000.000
Telepon, Air, Listrik dan Internet	46.097.266
Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000
Pembuatan RENJA	5.000.000
Pembuatan LAKIP	5.000.000

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

Alat Tulis Kantor	80.913.420
Penggandaan dan Cetak	71.557.250
Appraisal Penentuan Harga Lokasi Islamic Center	50.000.000
Appraisal Pembuatan Peta Lokasi Islamic Center	49.000.000
Appraisal Penentuan Harga Lokasi Jembatan Tanjung Selamat	17.500.000
Appraisal Penentuan Harga Lokasi Pemakaman	40.000.000
Appraisal Penentuan Harga Lokasi Kantor Pemerintah	49.000.000
Honorarium PHL/Tidak Tetap	140.760.000
Honorarium TNI yang diperbantukan	86.400.000
JUMLAH	5.156.514.569
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	11.144.489.410
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	
ARUS KAS MASUK	
Pendapatan Penjualan Aset	
JUMLAH	
ARUS KAS KELUAR	
Belanja Tanah	
Penelusuran Gang Warga	4.659.753.307
Pembuatan Fly Over Amplas	3.579.254.550
JUMLAH	8.239.007.857
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(8.239.007.857)
SALDO AWAL KAS DI KAS DAERAH (PPKD)	
SALDO AKHIR KAS DI KAS DAERAH (PPKD)	2.905.481.553
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	
SALDO AKHIR KAS	2.905.481.553

Lampiran 5

LAPORAN ARUS KAS
SKPD DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN : 2008

URAIAN	TAHUN 2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
ARUS KAS MASUK	
RETRIBUSI DAERAH	
Pendapatan Retribusi Cetak Peta	23.320.000
Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan Tanah	3.949.869.964
Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan	200.563.650
Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	16.442.158.713
JUMLAH ARUS KAS MASUK	20.615.912.327
ARUS KAS KELUAR	
Belanja Pegawai	
Gaji Pokok	3.174.376.560
Tunjangan Keluarga	380.214.819
Tunjangan Struktural	229.095.000
Tunjangan Umum	271.910.000
Tunjangan Beras	257.296.220
Tunjangan PPh	78.227.075
Pembulatan	97.105
Iuran Asuransi Kesehatan	65.196.149

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Beban Kerja	656.332.500
Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Pertimbangan Objektif	318.740.000
Belanja Pegawai-Honor Panitia Pelaksana Kegiatan (Penyusunan) RDTR	63.950.000
Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Renja	2.975.000
Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Lakip	2.975.000
Belanja Pegawai-Honor Panitia Penyusunan Laporan Keuangan	4.200.000
Belanja Pegawai-Honor PHL (Tidak Tetap)	134.028.000
Belanja Pegawai-Honorarium Tenaga Pengawa Non PNS	72.000.000
Belanja Pegawai-Upah Tenaga Kebersihan	9.000.000
Belanja Pegawai-Biaya Pendidikan	5.500.000
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Barang dan Jasa-ATK Penyusunan Renja	849.800
Belanja Barang dan Jasa-ATK Penyusunan Lakip	849.800
Belanja Barang dan Jasa-ATK Penyusunan Laporan Keuangan	2.299.875
Belanja Barang dan Jasa-ATK	72.442.286
Belanja Barang dan Jasa-Dokumentasi Administrasi Tender (ATK)	23.025.990
Belanja Barang dan Jasa-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.000.000
Belanja Barang dan Jasa-Internet	10.406.470
Belanja Barang dan Jasa-Jasa KONSULTAN Penyusunan RDTR Kecamatan	2.144.300.950
Belanja Barang dan Jasa-Barang Cetak	71.961.250
Belanja Barang dan Jasa-Fotocopy	190.000
Belanja Barang dan Jasa-Cetak dan Penggandaan Penyusunan Renja	750.000
Belanja Barang dan Jasa-Cetak dan Penggandaan Penyusunan Lakip	750.000
Belanja Barang dan Jasa-Cetak dan Penggandaan Penyusunan Laporan Keuangan	2.000.000
Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan Mobiler (Lemari Arsip)	9.424.000
Belanja Barang dan Jasa-Perawatan Jaringan Komputer dan Pendukung	9.092.000
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	8.075.455.849
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	12.540.456.478
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN	
ARUS KAS MASUK	
JUMLAH ARUS KAS MASUK	-
URAIAN	TAHUN 2008
Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pembuatan Jembatan)	280.974.000
Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pembuatan Fly Over Amplas)	6.545.925.891
Belanja Modal Tanah-(Ganti Rugi Pembuatan Gang Warga)	729.223.498
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Belanja Modal Tanah-Mesin Penghancur Kertas	4.500.000
Belanja Modal Tanah-Komputer PC	10.250.000
Belanja Modal Tanah-Komputer Note Book	31.000.000
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	7.601.873.389
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(7.601.873.389)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	
ARUS KAS MASUK	
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
JUMLAH ARUS KAS MASUK	
ARUS KAS KELUAR	
Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	-
JUMLAH ARUS KAS KELUAR	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	4.938.583.089
SALDO AWAL KAS DI KAS DAERAH (PPKD)	-
SALDO AKHIR KAS DI KAS DAERAH (PPKD)	4.938.583.089
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	-
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	-
SALDO AKHIR KAS	4.938.583.089

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.



Lampiran 6

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder (pemakai laporan keuangan) dalam membuat suatu keputusan sosial. Politik maupun ekonomi sehingga keputusan yang diambil berkualitas. Tapi tidak semua orang bisa membaca laporan keuangan, untuk menterjemahkannya perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan dan dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah mengakomodasi tuntutan dari masyarakat antara lain transparansi yaitu lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut secara umum untuk:

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (antara realisasi dan anggaran yang ditetapkan).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Dan secara khusus tujuan penyusunan laporan keuangan ini adalah:

- a. Apakah penerimaan (retribusi) periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Mengetahui jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil yang telah dicapai.
- c. Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- b. UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
- d. PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Bab 1. PENDAHULUAN.

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Bab II. PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.

Bab III: KEBIJAKAN AKUNTANSI.

- 3.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 3.3 Basis penukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah.

Bab IV: PENJELASAN LAPORAN POS KEUANGAN.

- 4.1 Pendapatan.
- 4.2 Belanja.
- 4.3 Pembiayaan.
- 4.4 Ekuitas dana.
- 4.5 Komponen komponen laporan arus kas.

Bab V: PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.

Bab VI: PENUTUP.

Bab II.

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

Untuk bisa memahami laporan kinerja keuangan dengan baik pembaca dan pengguna laporan perlu memahami elemen (pos) yang dilaporkan antara lain meliputi penelitian terhadap besaran nilai elemen (pos) dan kebenaran nilai tersebut serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, salah satunya adalah dengan melakukan analisis.

Analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara meneliti setiap elemen (pos) dan membandingkannya dengan nilai elemen tertentu atau elemen lainya untuk mendapatkan nilai rasio keuangan.

Analisis tersebut dapat dilaksanakan terhadap laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan dalam hal ini untuk penilaian tersebut dibuat batasan penilaian antara lain: kinerja pendapatan, kinerja belanja dan kinerja pembiayaan.

a. Analisis Kinerja Pendapatan.

Analisis terhadap kinerja pendapatan secara umum dilihat dari realisasi pendapatan dengan anggaran yang ditetapkan. Apabila realisasi melampaui target anggaran maka kinerjanya dapat dinilai baik, namun perlu dilihat dari komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh guna mengetahui lebih lanjut apakah pelampauan target tersebut disebabkan karena pengangguran yang baik dan kerja keras atau hanya semata mata beruntung saja.

Untuk memberikan ilustrasi analisis selisih pendapatan berikut disajikan data pendapatan tahun anggaran 2007 & 2008 :

**LAPORAN PENDAPATAN
SKPD DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN
KEADAAN PERTANGGAL 31 DESEMBER 2008**

URAIAN	TAHUN 2008			TAHUN 2007		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Retribusi Cetak Peta	10.000.000	23.320.000	233,20	18.000.000	17.210.000	96 %
Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan Tanah	6.500.000.000	3.949.869.964	60,77	5.500.000.000	4.407.783.210	80 %
Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan	180.000.000	200.563.650	111,42	10.000.000	189.626.025	189,6 %
Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	18.500.000.000	16.442.158.713	88,88	15.500.000.000	11.680.138.076	75 %
Jumlah	25.190.000.000	20.615.912.327	81,84	21.028.000.000	16.294.757.311	77 %

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan yang dicantumkan oleh manajemen dinas tata kota tahun anggaran 2007 secara umum kinerja pendapatan belum bisa dikatakan baik karena pencapaian target yang ditetapkan hanya sekitar 77% atau sekitar Rp. 16.291.757.311,- dari jumlah anggaran sebesar rp. 21.028.000.000,- walaupun pendapatan retribusi izin peletakan bahan kenaikannya sangat signifikan yaitu 189,6 %.

Berdasarkan daftar di atas, untuk tahun 2008 secara umum Kinerja Pendapatan belum bisa dikatakan baik dengan asumsi bahwa memiliki kinerja pendapatan baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan karena pencapaian target hana sekitar 81, 84 % atau sekitar Rp. 20.615.912.327,- dari jumlah anggaran sebesar Rp. 25.190.000.000,- walaupun pendapatan retribusi cetak peta kenaikannya sangat signifikan yaitu 133,20 %.

b. Analisis Kinerja Belanja.

Kinerja anggaran belanja dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan atau sekitar % s/d 16% hal ini mengesankan adanya efisiensi anggaran sekitar. Namun perlu juga diteliti lebih lanjut apakah realisasi yang lebih rendah tersebut dikarenakan adanya efisiensi atau karena kegiatan dan program tidak dijalankan yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran.

LAPORAN BELANJA
SKPD DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN KOTA MEDAN
KEADAAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2007

URAIAN	TAHUN 2008			TAHUN 2007		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.594.337.363	4.391.119.674	95 %	4.005.191.623	3.867.793.633	97 %
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.507.284.237	1.334.993.754	88 %	645.010.000	621.320.000	96 %
Belanja Kebersihan Kantor	1.000.000	1.000.000	100 %	4.173.000	4.173.000	100 %
Belanja Perbaikan Mobiler Kantor	10.000.000	9.424.000	94 %	2.000.000	2.000.000	100 %
Belanja Telp, Air, Listrik dan Internet	34.200.000	19.498.470	57 %	78.000.000	46.097.266	59 %
Belanja Pembuatan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.300.000	4.299.875	99 %	10.000.000	10.000.000	100 %
Belanja Pembuatan Rencana Kerja (RENJA)	1.600.000	1.599.800	99 %	5.000.000	5.000.000	100 %
Belanja Pembuatan LAKIP	1.600.000	1.599.800	99 %	5.000.000	5.000.000	100 %
Belanja Alat Tulis Kantor	174.960.000	95.468.276	54 %	108.017.900	80.913.420	75 %
Belanja Cetak dan Penggandaan	148.800.000	72.151.250	48 %	143.827.200	71.577.250	50 %
Belanja Baramg dan Jasa Ganti Rugi Pemb. Fly Over Amplas	-	-	-	173.501.100	160.095.800	92 %
Belanja Tanah Jalan Pemb. Fly Over Amplas	8.091.000.000	6.545.925.891	80 %	9.440.980.400	4.499.657.507	48 %
Belanja Barang dan Jasa Ganti Rugi Pemb. Gang Warga	-	-	-	129.937.850	113.295.250	87 %
URAIAN	TAHUN 2008			TAHUN 2007		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Tanah Jalan (Gang Warga)	3.935.000.000	729.223.498	18 %	5.883.961.150	3.465.959.300	59 %
Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Lokasi Islamic Center	-	-	-	50.000.000	50.000.000	100 %
Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Peta Lokasi Islamic Center	-	-	-	49.000.000	49.000.000	100 %
Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Jembatan Tanjung Selamat	-	-	-	17.500.000	17.500.000	100 %
Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Kantor Pemerintah	-	-	-	49.000.000	49.000.000	100 %
Belanja Jasa Konsultan (Apraisal) Pemkaman Umum	-	-	-	40.000.000	40.000.000	100 %
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota	-	-	-	400.000.000	0	0 %
Survey dan Pemetaan	-	-	-	1.000.000.000	0	0 %
Informasi Rencana Kota dan Pelayanan Kepada Masyarakat	-	-	-	21.134.900	0	0 %
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	130.000.000	-	-	36.000.000	0	0 %
Pengadaan/ Pembebasan tanah untuk Pemakaman (BDB)	-	-	-	5.500.000.000	0	0 %
Pengadaan/ Pembebasan tanah untuk Pertapakan Fasilitas Sosial Keagamaan	-	-	-	60.000.000.000	0	0 %
Pengadaan/ Pembebasan tanah untuk Kantor	-	-	-	1.800.000.000	0	0 %

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

Pemerintah						
Pengadaan/ Pembebasan tanah untuk Sarana Pendidikan	-	-	-	950.000.000	0	0 %
Pengadaan/ Pembebasan tanah untuk Pelebaran Jalan	-	-	-	4.000.000.000	0	0 %
Pengadaan/ Pembebasan tanah untuk Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar	-	-	-	1.451.831.000	0	0 %
Pengadaan/ Pembebasan tanah untuk Pemakaman	-	-	-	1.289.000.000	0	0 %
Pengadaan/ Pembebasan tanah untuk Pertapakan Fasilitas Sosial Keagamaan	-	-	-	32.400.000.000	0	0 %
Digitalisasi Blad Kota Medan	90.000.000	-	-	-	-	-
Jasa Konsultan Peny.RDTR Kecamatan	2.835.000.000	2.144.300.950	75 %	-	-	-
Belanja Modal tanah ganti rugi Pemb. Jembatan	950.000.000	280.974.000	29 %	-	-	-
Belanja Modal ganti rugi Pembangunan Medan Islamic Center	83.350.000	-	-	-	-	-
Belanja modal ganti rugi Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10.000.000.000	-	-	-	-	-
Belanja ganti rugi Penataan Taman Pemakaman Umum	5.500.000.000	-	-	-	-	-
Belanja modal-mesin Penghancur kertas	6.750.000	4.500.000	66 %	-	-	-
Belanja Modal-Komputer PC	10.250.000	10.250.000	100 %	-	-	-
Belanja Modal-Komputer Note book	31.000.000	31.000.000	100 %	-	-	-
Belanja Modal-Pengadaan Perlatan Gedung kantor	50.000.000	-	-	-	-	-
Jumlah	123.457.081.600	15.677.329.238	13 %	129.688.066.123	13.158.382.426	10 %

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2007, realisasi belanja adalah sebesar 10% dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan adanya kinerja belanja yang baik karena adanya efisiensi belanja sebesar 90%, tapi dari 90% efisiensi disebabkan oleh adanya anggaran yang tidak terserap sebesar 87% sekitar Rp. 108.596.765.900, jadi secara matematis penghematan anggaran hanya sekitar 3% dari jumlah belanja yang terealisasi.

Dengan adanya anggaran yang tidak terealisasi sebesar 87% ini mengesankan adanya perencanaannya anggaran yang kurang baik.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2008 secara umum terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan efisiensi dan penghematan anggaran. Anggaran belanja terserap 13 %, penghematan anggaran belanja yang dilakukan dalam tahun anggaran 2008 sebesar Rp 101.120.000.000,- atau sekitar 87 % dari total APBD Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan. Tetapi dari penghematan yang 87 % disebabkan oleh adanya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 101.120.000,- atau sekitar 81,91 % dari total anggaran. Berdasarkan hal ini menunjukkan pada kita adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran, untuk itu sebagai antisipasi untuk tahun anggaran berikutnya perlu membuat Analisa Standar Biaya yang akurat.

c. Analisa Pembiayaan.

Analisa pembiayaan dilakukan untuk melihat pola anggaran, juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran, antara lain analisa penggunaan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Dalam sistem anggaran kinerja tidak berarti jelek atau berakibat dipotongnya anggaran periode berikutnya. Bahkan apabila terdapat sisa anggaran maka sisa tersebut dapat dipergunakan untuk tahun anggaran berikutnya sehingga tidak akan hangus.

Pada umumnya pos SILPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan apabila terjadi defisit anggaran yaitu tanggal 31 Desember. Karena SILPA merupakan Kas Bebas yang belum terikat penggunaannya.

Analisa SILPA ini menggambarkan apakah karena keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran atau justru karena lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksana secara optimal.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran, realisasi pembiayaan secara umum tidak menimbulkan keraguan karena dinas tata kota dan tata bangunan tidak mengelola anggaran pembiayaan.

d. Analisa Kinerja APBD Dinas Tata Dan Tata Bangunan Secara Umum.

Dengan memperhatikan kinerja pendapatan, kinerja belanja dan pembiayaan maka kita dapat menilai kinerja APBD secara umum. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas maka secara umum kinerja APBD dinas tata kota dan tata bangunan kota medan menunjukkan kinerja yang kurang baik karena pendapatan tidak dapat terealisasi sesuai jumlah yang dianggarkan dan anggaran pengeluaran tidak menunjukkan efisiensi yang sebenarnya.

Bab III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

3.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Entitas pelaporan keuangan dalam hal ini adalah manajemen dinas tata kota dan tata bangunan anggaran dan kasubbag keuangan sebagai pejabat penata usahaan keuangan (PPK-SKPD).

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Untuk laporan realisasi anggaran basis akuntansi yang mendasarinya adalah basis kas dimana untuk pendapatan, diakui pada saat diterima serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan. Dan tidak menggunakan istilah laba melainkan silpa (sisa perhitungan

anggaran untuk setiap tahun anggaran yang bisa lebih dan bisa kurang tergantung pada selisih antara penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja.

Untuk neraca basis akuntansi yang mendasarinya adalah basis akrual menunjukkan bahwa asset, Kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi bukan pada saat kas diterima.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran dalam hal ini adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis pendapatan dan asset dicatat sebesar nilai penerimaan kas.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

- Aset dicatat sebesar nilai pengeluaran kas.
- Belanja langsung (LS) gaji dan tunjangan juga LS barang dan jasa dicatat sebesar nilai brutto walaupun yang diterima adalah sebesar nilai netto (setelah dikurangi pajak).
- Pada belanja tambahan penghasilan bagi PNS berupa uang makan tunjangan kesejahteraan, tunjangan kedisiplinan dan tunjangan bendahara pada pengeluaran kas tanggal 25 agustus 2007, tanggal 10 dan 25 oktober 2007. telah tercatat nilai netto yang mengakibatkan tidak dicatat sebagai penerimaan pajak (PPH 21) dan pada akhirnya periode pembukuan telah dilaksanakan perbaikan dengan memakai Jurnal Penyesuaian.

Bab IV.

Penjelasan Laporan Pos Pos Keuangan.

4.1 Pendapatan.

Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam priode tahun anggaran bersangkutan.

Penerimaan dinas tata kota dan tata bangunan kota medan berasal dari retribusi. Untuk tahun anggaran 2007 pendapatan retribusi tersebut ditargetkan sebesar Rp. 21.028.000.000,- yang terealisasi hanya sebesar Rp. 16.294.757.311,- sekitar 77% terdiri dari:

- Pendapatan retribusi izin peletakan bahan bangunan Rp. 189.626.025,-
- Pendapatan retribusi cetak peta Rp. 17.210.000,-
- PendapatanRetribusi Cetak Peta Rp. 11.680.138.076
- Pendapatan retribusi IMB Rp. 4.407.783.210,-
- Penerimaan lainnya sebesar Rp. 6.246.668,- merupakan pengembalian gaji dan tunjangan dari pegawai yang telah memasuki masa pensiun.

Untuk tahun Anggaran 2008 Pendapatan Retribusi tersebut ditargetkan sebesar Rp 25.190.000.000,- yang terealisasi hanya sebesar Rp 16.294.757.311,- sekitar 82 % terdiri dari :

- Pendapatan Retribusi Izin Peletakan Bahan Bangunan Rp 189.626.025,-
- Pendapatan Retribusi Cetak Peta Rp 23.320.000,-
- Pendapatan Retribusi IMB Rp 16.442.158.713,-
- Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan Rp 3.949.869.964,-
- Pendapatan Izin Peletakan Bahan sebesar Rp 200.563.650,-

4.2 Belanja.

Belanja adalah semua pengeluaran pada satu priode anggaran. Pengeluaran dinas tata kota dan tata bangunan kota medan dibagi dalam beberapa kelompok antara lain:

Tahun Anggaran 2007 :

a. Belanja administrasi umum yaitu pengeluaran yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan. Untuk tahun anggaran 2007 belanja tersebut terdiri dari:

- Belanja pegawai yaitu yang berhubungan langsung dengan pegawai berupa: gaji dan tunjangan sebesar Rp.4.005.191.621,- setelah ditambah dengan anggaran P.APBD sebesar Rp. 191.150.917,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.867.793.633,- (97%).
- Belanja barang yaitu merupakan pengeluaran untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan umum antara lain:
 - Biaya bahan pakai habis berupa biaya listrik, air, telpon dll yang di anggarkan sebesar Rp.78.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.097.266,- (59%). Belanja pembuatan laporan akhir tahun dengan rencana anggaran sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.000.000,- (100%). Belanja pembuatan rencana kerja tahun 2008 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- (100%). Belanja pembuatan LKIP tahun 2007 dengan rencana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,- (100%). Belanja alat tulis kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp. 108.017.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 80.913.420,- (75%).
 - Belanja cetak dan penggandaan. Rencana anggaran sebesar Rp. 143.827.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 71.577.250,- (50%). Belanja jasa konsultan independen sebesar Rp. 205.500.000,- terealisasi Rp. 205.500.000,- (100%).
 - Belanja pemeliharaan yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan barang yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan umum, antara lain: Belanja kebersihan

kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.173.000,- dengan realisasi Rp. 4.173.000,- (100%). Belanja pemeliharaan mobiler kantor dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.000.000,- (100%), Belanja pemeliharaan peralatan kantor dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,- (100%).

- b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan prasarana publik yaitu semua pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan publik, antara lain : Belanja pegawai yang sifatnya variabel (tidak tetap) untuk tahun anggaran 2007 antara lain Belanja Tambahan Penghasilan PNS berupa Uang Makan, Tunjangan Kesejahteraan, Tunjangan Kepala Dinas dan Tunjangan Khusus Bendahara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 645.010.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 621.320.000,-(96%).
- c. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan dan selanjutnya akan menambah biaya operasi dan pemeliharaan. Tahun anggaran 2007 dianggarkan sebesar: Rp. 15.628.380.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.239.007.857,- (53%) yang terdiri dari Belanja Tanah Jalan Pemb. Fly Over Amplas Rp. 4.659.753.057,- dan belanja Tanah Jalan (Gang Warga) Rp. 3.579.254.550,-
- d. Disamping belanja tersebut terdapat belanja yang tidak terealisasi sekitar Rp. 108.596.765.900,- atau 87% dari jumlah anggaran.

Tahun Anggaran 2008 :

- a. Belanja Administrasi Umum terdiri dari :

- Belanja Pegawai yaitu berhubungan langsung dengan pegawai berupa: Gaji dan tunjangan dengan realisasi sebesar Rp 5.736.113.428,- (9%) dari total anggaran nominal Rp 6.101.621.600,-
 - Belanja Barang dan Jasa yaitu merupakan pengeluaran untuk penyediaan Barang dan Jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik antara lain: Biaya Bahan Pakai Habis berupa pembelian Alat Tulis Kantor dan Cetakan dan Jasa lainnya yang dianggarkan sebesar Rp 3.431.460.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.349.342.421,- (68%).
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan dan selanjutnya akan menambah biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja Modal terdiri dari 2 item yaitu belanja modal tanah dan Mesin/Peralatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 113.942.000.000,- dengan realisasi untuk Belanja Modal terdiri Ganti Rugi Tanah Pembangunan Fly Over Amplas dan Pelebaran Gang Warga serta pelebaran Jembatan Tanjung Selamat sebesar Rp 7.556.123.389,- sedangkan Pembangunan Medan Islamic Center, penataan ruang terbuka hijau dan penataan taman pemakaman umum tidak terealisasi dengan jumlah anggaran sebesar Rp 100.850.000,- (88,52 %) dari total belanja modal mesin dan peralatan dianggarkan sebesar Rp 98.000.000,- terealisasi untuk pembelian komputer dan mesin penghancur kertas sebesar Rp 45.750.000,-

4.3 Pembiayaan

Untuk tahun anggaran 2007 % 2008 Dinas Tata Kota tidak ada mengelola pembiayaan, pembiayaan tersebut antara lain :

- a. Pembiayaan penerimaan adalah semua penerimaan yang berasal dari antara lain pinjaman, penjualan obligasi, penjualan investasi, dll.
- b. Pembiayaan pengeluaran adalah semua pengeluaran antara lain pemberian pinjaman, penyertaan modal, dll.

4.4 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah hak residual atau aktiva dalam entitas setelah dikurangi seluruh kewajiban. Pada neraca untuk tahun anggaran 2007 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp. 2.899.214.885,- sedang ekuitas Dana Investasi yaitu diinvestasikan kepada asset tetap sebesar Rp. 8.239.007.857,- berupa tanah pembangunan Fly Over Amplas dan Penelusuran Gang Warga.

Pada Neraca untuk tahun anggaran 2008 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar yang merupakan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 4.938.583.089,-.

4.5 Komponen-komponen Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas yaitu laporan tentang penerimaan dan pengeluaran satu periode anggaran dimana penerimaan dan pengeluaran tersebut diklasifikasikan dalam kegiatan operasi, pembelanjaan dan investasi.

Untuk tahun anggaran 2007 Penerimaan dari aktivitas Operasi terdiri dari Retribusi Izin Peletakan Bahan, Pendapatan Retribusi Cetak Peta, Pendapatan Retribusi IMB dan pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan dengan jumlah sebesar Rp. 16.294.757.311,- dan pengeluaran adalah belanja pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 11.138.242.742,-

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tidak ada sedang kas keluar diinvestasikan kepada tanah pembangunan Fly Over Amplas dan Pelurusan Gang Warga sebesar Rp. 8.239.007.857,-

Saldo Kas akhir berada pada Rekening Kas Daerah (PPKD) sebesar Rp. 2.899.234.885,-

Untuk Tahun Anggaran 2008 Penerimaan dari aktivitas Operasi terdiri dari Retribusi Izin Peletakan Bahan, Pendapatan Retribusi Cetak Peta, Pendapatan Retribusi IMB dan Pendapatan Retribusi Perubahan Peruntukan dengan jumlah sebesar Rp 20.615.912.327,- dan Pengeluaran adalah belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp 8.075.455.849,-

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tidak ada sedang kas keluar diinvestasikan Tanah Pembangunan Fly Over Amplas dan Pelurusan Gang Warga serta pelebaran jembatan Tanjung Selamat dan pembelian peralatan dan mesin berupa komputer dan mesin penghancur kertas sebesar Rp 7.601.873.389,-

Saldo kas akhir berada pada Rekening Kas Daerah (PPKD) sebesar Rp 4.938.583.089,-.

Bab V

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Seluruh nilai yang dicatat dalam Laporan Keuangan diasumsikan bahwa Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan Kota Medan Keuangannya mandiri yang artinya

Penerimaan Pendapatan dipergunakan untuk Pengeluaran Belanja baik Belanja Rutin (Operasional) maupun belanja modal tanpa ada bantuan dari pihak lain seperti :

- Dana bagi Hasil propinsi atau daerah lainnya
- Dana Bantuan Pemerintah Pusat
- SILPA merupakan setoran Kas kepada Rekening Kas Daerah (PPKD).

Dengan tercatatnya nilai netto seperti pada Tambahan Penghasilan PNS yaitu sebesar Rp. 42.300.750,- seolah-olah PPh 21 tidak dipungut/disetor atau mengurangi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Bab VI

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Sistem pembukuan akuntansi yang diterapkan manajemen Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan adalah sistem pembukuan berpasangan (*double entry*) dimana setiap transaksi dicatat dua kali artinya setiap transaksi terdapat dua akun (rekening) yang akan dipengaruhi dan memakai istilah Debet dan Kredit harus sama. Dan ini dilaksanakan untuk:
 - a. Laporan Keuangan yang dihasilkan lebih mudah untuk dilakukan audit
 - b. Pelacakan antara bukti transaksi, catatan, dan keberadaan kekayaan, utang, dan ekuitasnya lebih mudah dilakukan.
 - c. Pengukuran kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
 - d. Keadaan asset dan utang piutang dapat diketahui secara lebih akurat
2. Laporan Keuangan yang dihasilkan yaitu berupa:

- a. NERACA yaitu informasi mengenai posisi keuangan berupa Asset (harta), Kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada saat (tanggal) neraca tersebut diterbitkan
 - b. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) yang mempunyai empat pos utama yaitu pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan SILPA.
 - c. LAPORAN ARUS KAS (LAK) ada empat aktivitas utama aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
 - d. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN yaitu penjelasan lebih rinci atas elemen-elemen dalam Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi anggaran, dan Laporan Arus Kas).
3. Kebijakan akuntansi misalnya metode depresiasi (penghapusan) aset, penentuan nilai persediaan dll, juga sistem akuntansi harus sejalan dengan Standar Akuntansi yang akan dijadikan sebagai dasar bagi bagian akuntansi dan pihak pembaca laporan keuangan. Ketiga hal tersebut harus berpedoman kepada keputusan dari Kepala Daerah
 4. Laporan Akuntansi pada dasarnya disajikan dengan cara rasional berdasarkan logika sistematis, sehingga siapapun bisa memahaminya dengan sarat apabila memahami logika akuntansi.



Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.



Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.



Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.



Endah Noviana : Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Dinas Tata Kota Tata Bangunan), 2010.